



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

*KECAMATAN GAMBUT
KABUPATEN BANJAR*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Kecamatan Gambut Tahun 2026 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Triwulan I Kecamatan Gambut Tahun 2026 ini adalah merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum, serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SKPD Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2025 - 2029, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan I Kecamatan Gambut Tahun 2026 ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Gambut sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.

Gambut, April 2026
Camat Gambut



Randani, S.AP., MA
NIP. 19710514 200604 1 017

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan	1
1.2 Tugas dan Fungsi	1
1.3 Isu Strategis	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Indikator Kinerja Utama	14
2.2 Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Gambut	31
BAB IV	117
PENUTUP	117
4.1 Kesimpulan	117
4.2 Langkah Perbaikan kedepan	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Isu Strategis Kecamatan Gambut.....	13
Tabel 2 1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gambut Tahun 2025	16
Tabel 2 2 Sasaran Strategis dan Sasaran Kinerja Kecamatan Gambut.....	19
Tabel 3 1 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Kinerja Kecamatan Gambut	32
Tabel 3 2 Realisasi Anggaran Kecamatan Gambut.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

1. Maksud
 - a) Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Kecamatan Gambut;
 - b) Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Gambut;
 - c) Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan;
 - d) Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.
2. Tujuan
 - a) Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Gambut kepada Bupati;
 - b) Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kecamatan Gambut; dan
 - c) Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Gambut

1.2 Tugas dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu *“Menangani Sebagian Unsur Otonomi Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Di Wilayah Kecamatan Tertentu”*.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas. Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya;
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;

- c. Pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional

3. Dasar Hukum

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan;
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Bupati Banjar 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025; dan
19. Surat Keputusan Camat Gambut Nomor 031 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

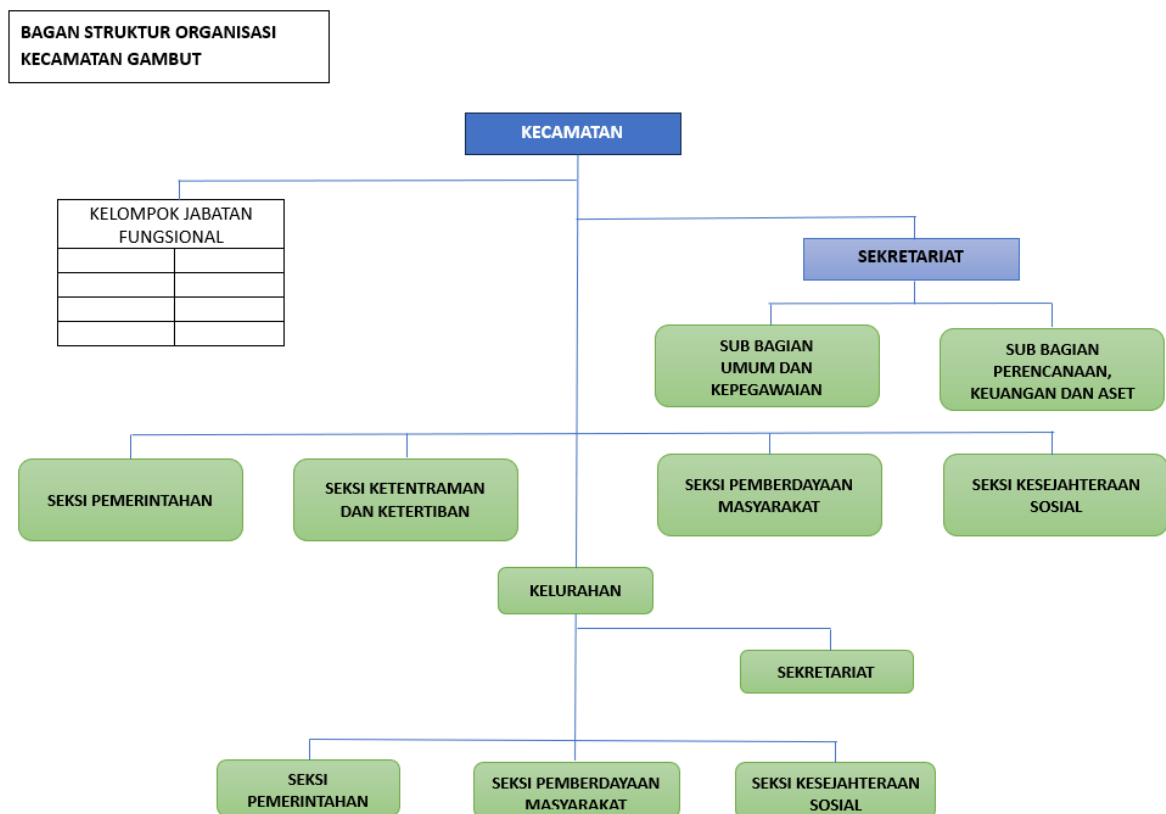
4. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari :

- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:



Gambar 1. 1 SOTK Kecamatan Gambut

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Uraian Tugas masing-masing unit perangkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

A. Camat

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
9. Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten);
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

B. Sekretaris Kecamatan

1. Menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
2. Memantau pengelolaan anggaran di lingkungan Kecamatan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
3. Menyelenggarakan urusan surat-menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
4. Menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Kecamatan;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Kecamatan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

1. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;

3. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
4. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Kecamatan;
7. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana;
8. Mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
9. Menghimpun bahan penyusunan dokumen Uraian Tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Kecamatan;
10. Menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
11. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penjagaan kenaikan pangkat pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, cuti, absensi pegawai;
12. Melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Kecamatan;
13. Menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

b. Sub Bag Perencanaan, Keuangan Dan Aset

1. merencanakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
2. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan;
3. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan beserta dokumen penunjangnya;

4. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
5. menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan Unit di lingkungan Kecamatan;
6. menyusun Profil Kecamatan berdasarkan masukan unsur- unsur di lingkungan Kecamatan;
7. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, Aset dan akuntansi keuangan Kecamatan;
8. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
9. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana tahunan barang Unit;
10. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
11. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan Aset; dan
12. menyusun laporan program dan kegiatan Kecamatan secara berkala berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
13. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
14. menghimpun bahan penyusunan laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta laporan lainnya berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
15. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan

C. Seksi Pemerintahan

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana Seksi Pemerintahan;

2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemerintahan;
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan desa/Kelurahan (data aparat desa/Kelurahan, tunjangan pambakal/aparat desa, inventaris kekayaan desa, buku induk penduduk, buku tanah didesa, Peraturan Desa, rekapitulasi penduduk akhir bulan dan lain-lain);
4. Melaksanakan inventarisasi dan mengolah data yang berkaitan dengan pemerintahan;
5. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Pambakal/Lurah, Instansi Vertikal dan Unit Kerja tingkat Kecamatan;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemilihan Pambakal;
7. Melaksanakan bimbingan pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (apbdes);
8. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kerjanya;
9. Menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
10. Membantu pembinaan dan penyelesaian masalah pemerintahan desa/Kelurahan termasuk permasalahan batas desa/Kelurahan dan sengketa tanah;
11. Melaksanakan tugas-tugas bidang keagrariaan dan layanan registrasi Surat Keterangan Tanah;
12. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

D. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta fasilitasi pembinaan Polisi Pamong Praja;
2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
3. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang berkaitan dengan ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
4. Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan aparat terkait dalam rangka pembinaan ketertiban umum;

5. Melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap prasarana dan sarana serta fasilitas umum, fasilitas sosial dan Aset yang ada di wilayah Kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
7. Melaksanakan pemantauan kegiatan dan permasalahan yang ada di masyarakat untuk membantu proses penyelesaiannya agar selalu tercipta/terpelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
8. Melaksanakan pengawasan dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
9. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap anggota perlindungan masyarakat;
10. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
11. Menyampaikan laporan yang berhubungan dengan ketertiban umum kepada instansi yang menangani;
12. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

E. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan masyarakat;
2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran seksi pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat, sarana dan prasarana pelayanan umum, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sumber daya dan permukiman desa;
4. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data kegiatan ekonomi pembangunan dan ketahanan masyarakat;
5. Melaksanakan pengadministrasian kegiatan-kegiatan pembangunan dari dana bantuan pembangunan desa/Kelurahan atau dari dana bantuan lainnya;

6. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
7. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan yang meliputi:
 - a. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Perencanaan partisipasi pemberdayaan masyarakat;
 - c. Perpustakaan desa;
 - d. Bimbingan dan motivasi swadaya gotong royong serta pengembangan informasi dalam pemberdayaan masyarakat;
 - e. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - f. Pengembangan tradisi dan budaya masyarakat;
 - g. Pendataan dan evaluasi lomba desa dan lomba kelurahan;
 - h. Pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa;
 - i. Penyusunan data profil desa/kelurahan;
 - j. Pengembangan sistem manajemen pembangunan desa terpadu antara lain pengembangan potensi dan inovasi desa;
 - k. Pembinaan desa miskin/tertinggal;
 - l. Penataan ruang kawasan terpadu;
 - m. Peningkatan peran serta masyarakat pedesaan dalam pelestarian lingkungan;
 - n. Identifikasi, inventarisasi dan rehabilitasi serta konservasi sumber daya alam; dan/atau
 - o. Rehabilitasi perumahan dan permukiman desa.
8. Mengoordinasikan musyawarah pembangunan tingkat desa dan Kelurahan;
9. Fasilitasi penyelenggaraan program pembangunan pengentasan kemiskinan;
10. Melaksanakan fasilitasi pembinaan Lembaga kemasyarakatan lainnya;
11. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
12. Menyelenggarakan musyawarah Pembangunan tingkat Kecamatan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

F. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Penyusunan program dan pembinaan bidang sosial;

2. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
3. Pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat;
4. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan;
5. Pelaksanaan dan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya;
6. Pembinaan dan peningkatan partisipasi kegotong royongan masyarakat; dan
7. Pembinaan organisasi sosial masyarakat, penyelenggaraan dan fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok JF mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang JF yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Setiap Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Camat.

1.3 Isu Strategis

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pelayanan publik Kecamatan Gambut, upaya untuk **"meningkatkan tata kelola yang akuntabel dan melayani"** menjadi isu strategis yang sangat relevan, terutama dalam menjawab tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi, efisiensi, dan partisipasi.

Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan dan kinerja pemerintahan yang lebih baik kepada masyarakat menjadi fokus penting bagi pemerintah. Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kecamatan menjadi tolak ukur pelayanan untuk tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh kecamatan berpengaruh terhadap citra pelayanan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya. Optimalisasi dan

peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal penting yang sangat penting.

Masih ditemukannya berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti belum optimalnya sistem perencanaan berbasis data, lemahnya akuntabilitas kinerja aparatur, serta rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, menunjukkan pentingnya pembenahan yang menyeluruh terhadap mekanisme tata kelola. Selain itu, keterbatasan dalam penerapan teknologi informasi serta belum meratanya pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip pelayanan prima menjadi tantangan tersendiri.

Isu ini juga berkaitan erat dengan fungsi kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten yang harus mampu menjembatani kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola yang baik bukan hanya menyangkut aspek administratif dan pengelolaan sumber daya, tetapi juga menyentuh pada kualitas interaksi antara pemerintah dan warga, baik dalam bentuk pelayanan langsung maupun dalam penyusunan program pembangunan yang partisipatif.

Peningkatan tata kelola yang akuntabel dan melayani dapat diwujudkan melalui berbagai langkah strategis, seperti:

- a. Penguatan sistem pengendalian internal dan pelaporan kinerja aparatur;
- b. Pengembangan standar operasional prosedur (SOP) untuk setiap jenis layanan publik;
- c. Penerapan pelayanan berbasis digital untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi;
- d. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi;
- e. Pelibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan.

Dengan memperkuat tata kelola yang akuntabel dan melayani, Kecamatan Gambut diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang profesional, responsif, dan dipercaya oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional maupun daerah yang menempatkan pelayanan publik sebagai ukuran utama keberhasilan pemerintahan.

Tabel 1 1 Isu Strategis Kecamatan Gambut

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN KECAMATAN	PERMASALAHAN KECAMATAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KECAMATAN	ISU LINGKUNGAN YANG DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KECAMATAN			ISU STRATEGIS KECAMATAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan publik yang telah berjalan	1. Pelayanan publik yang belum optimal 2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal 3. Kapasitas ASN masih terbatas	Masih lemahnya sistem pendataan capaian TPB	Tata Kelola Keuangan Global	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang belum optimal	Peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber : Kecamatan Gambut, 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Kecamatan Gambut mengampu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Berdasar urusan dan program yang diampu, Kecamatan Gambut mendukung pencapaian misi keempat Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu :

**“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Profesional,
Bersih dan Melayani”**

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran masing-masing.

Tabel 2 1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gambut

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diperoleh hasil pengukuran dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang meliputi 9 unsur yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yaitu : - kesesuaian persyaratan; - Prosedur pelayanan; - Kecepatan pelayanan; - Kewajaran biaya; - Kompetensi petugas; - Prilaku petugas pelayanan; - Penanganan pengaduan; dan - Kualitas sarana dan prasarana. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berarti adanya perbaikan atau peningkatan dalam berbagai aspek yang mempengaruhi pengalaman dan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan	$IKM = \frac{\sum Total\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{\sum Unsur\ yang\ terisi} \times 25$	CAMAT	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan Melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)	$\left(\frac{\sum Total\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Unsur}{\sum Total\ Unsur\ yang\ terisi} \right) \times 100\%$	CAMAT	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah skor atau nilai yang diberikan kepada instansi pemerintah berdasarkan tingkat pencapaian kualitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, yang diukur berdasarkan hasil evaluasi penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai ini mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja serta penggunaan anggaran berbasis hasil.	$\sum ((\text{Perencanaan Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pengukuran Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pelaporan Kinerja} \times 15\%) + (\text{Evaluasi Internal} \times 25\%))$ Komponen penilaian: 1) Perencanaan kinerja 30% 2) Pengukuran kinerja 30% 3) Pelaporan kinerja 15% 4) Evaluasi internal 25% Dari masing-masing komponen penilaian terdapat sub-komponen dengan bobot penilaian: 1) Sub-komponen keberadaan 20% 2) Sub-komponen kualitas 30% 3) Sub-komponen pemanfaatan 50% Kategori penilaian: AA : > 90 – 100 (Sangat Memuaskan) A : > 80 – 90 (Memuaskan) BB : > 70 – 80 (Sangat Baik) B : > 60 – 70 (Baik) CC : > 50 - 60 (Cukup Memadai) C : > 30 – 50 (Kurang) D : > 0 – 30 (Sangat Kurang)	CAMAT	LHE Perangkat Daerah

Sumber : Surat Keputusan IKU Kecamatan Gambut

2.2 Perjanjian Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2026 mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2026 meliputi sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Sasaran Kinerja Kecamatan Gambut

No	Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Target Triwulanan	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggungjawab
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = (\sum \text{Total nilai persepsi per unsur}) / (\sum \text{Unsur yang terisi}) \times 25$	96	NA	Nilai		Rp 6,604,220,620	CAMAT
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	$((\sum \text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}) / (\sum \text{Total Unsur yang terisi})) \times 100\%$	97.50	NA	Nilai			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	$\sum ((\text{Perencanaan Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pengukuran Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pelaporan Kinerja} \times 15\%) + (\text{Evaluasi Internal} \times 25\%))$	80.50	NA	Nilai			
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut	$IKKI = \sum (\text{Unsur kinerja utama} \times 40\%) + (\text{Unsur kepatuhan} \times 30\%) + (\text{Unsur Pelayanan Umum} \times 30\%)$	89.00	NA	Indeks	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota daerah	Rp 4,728,949,000	SEKCAM
5	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	$(\sum (\text{Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai Ketentuan})) / (\sum (\text{Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun})) \times 100\%$	100	30	Persen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 25,872,000	KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET
							Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp 6,784,000	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 3,878,000	
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 3,180,000	
							Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 5,310,000	
							Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 6,720,000	

No	Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Target Triwulanan	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggungjawab
6	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	$(\sum(\text{Dokumen keuangan dan aset yang disusun sesuai ketentuan})) / (\sum(\text{Dokumen keuangan dan aset yang disusun})) \times 100\%$	100	26.32	Persen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4,033,632,000	KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET
							Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp 3,970,200,000	
							Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Rp 60,960,000	
							Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Rp 2,472,000	
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	$(\sum(\text{Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset BMD yang disusun sesuai ketentuan})) / (\sum(\text{Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset BMD yang disusun})) \times 100\%$	100	25	Persen	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp 2,000,000	KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET
							Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Rp 2,000,000	
8	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	$(\sum(\text{Administrasi Kepegawaian yang sesuai dan tepat waktu})) / (\sum(\text{Administrasi Kepegawaian yang dibutuhkan})) \times 100\%$	100	40	Persen	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 4,080,000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Rp 4,080,000	
9	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	$(\sum(\text{Administrasi Umum yang terfasilitasi})) / (\sum(\text{Administrasi Umum yang dibutuhkan})) \times 100\%$	100	25	Persen	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 171,231,000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Rp 6,479,000	
							Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 24,798,000	
							Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp 4,307,000	
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 6,100,000	

No	Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Target Triwulanan	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggungjawab
							Fasilitasi kunjungan tamu	Rp 4,980,000	
							Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 109,600,000	
							Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Rp 14,967,000	
10	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	$(\sum \text{Realisasi BMD}) / (\sum \text{BMD yang direncanakan}) \times 100\%$	100	100	Persen	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Rp 91,768,000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Pengadaan Mebel	Rp 20,968,000	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp 70,800,000	
11	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	$(\sum \text{Jasa Penunjang yang terpenuhi}) / (\sum \text{Jasa penunjang yang harus dipenuhi}) \times 100\%$	100	25	Persen	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 228,946,000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4,436,000	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 53,540,000	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 170,970,000	
12	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	$(\sum \text{BMD yang terpelihara}) / (\sum \text{Pemeliharaan BMD yang direncanakan}) \times 100\%$	100	24.45	Persen	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 171,420,000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp 95,360,000	
							Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 16,860,000	
							Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp 59,200,000	
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan	$(\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan}) / (\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang direncanakan}) \times 100\%$	100	25	Persen	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 70,852,000	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

No	Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Target Triwulanan	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggungjawab
		Pelayanan yang terlaksana							
14	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	$(\sum(\text{Usuran Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana})) / (\sum(\text{Usuran Pemerintahan yang dilimpahkan})) \times 100\%$	100	25	Persen	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 8,636,000 Rp 8,636,000	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
15	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan = $(\sum(\text{Realiasi Koordinasi Penyelenggaraan Monitoring Evaluasi Pelayanan})) / (\sum [\text{Rencana Koordinasi}]) \times 100\%$	100	25	Persen	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 4,480,000 Rp 4,480,000	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
16	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	$(\sum(\text{Usuran Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana})) / (\sum(\text{Usuran Pemerintahan yang dilimpahkan})) \times 100\%$	100	15	Persen	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Rp 57,736,000 Rp 57,736,000	
17	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	$(\sum(\text{Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan})) / (\sum(\text{Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan})) \times 100\%$	100	42	Persen	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 98,077,000	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
18	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	$(\sum(\text{Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dilaksanakan yang})) / (\sum(\text{Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa direncanakan yang})) \times 100\%$	100	60	Persen	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang di desa Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Rp 42,182,000 Rp 15,318,000 Rp 26,864,000	

No	Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Target Triwulanan	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggungjawab
19	Terselenggaranya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	$(\sum(\text{Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang terlaksana}))/(\sum(\text{Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang direncanakan})) \times 100\%$	100	24	Persen	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp 55,895,000	
							Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Rp 55,895,000	
20	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	$(\sum(\text{Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang ditindaklanjuti}))/(\sum(\text{Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang diterima})) \times 100\%$	100	NA	Persen	Program Koordinasi upaya penyelenggaraan trantibum	Rp 14,862,000	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
21	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	$(\sum(\text{Koordinasi Trantibum yang dilaksanakan}))/(\sum(\text{Koordinasi Trantibum yang direncanakan})) \times 100\%$	100	NA	Persen	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 11,802,000	
22	Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	$(\sum(\text{Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti}))/(\sum(\text{Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang diterima})) \times 100\%$	100	25	Persen	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 11,802,000	
23	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban	Persentase Pelayanan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang sesuai dengan Standar Pelayanan	$(\sum(\text{Pelayanan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang diberikan Sesuai Standar Pelayanan}))/(\sum(\text{Pelayanan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang diterima})) \times 100\%$	100	25	Persen			
24	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan	$(\sum(\text{Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan}))/(\sum(\text{Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada yang direncanakan})) \times 100\%$	100	NA	Persen	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 3,060,000	

No	Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Target Triwulanan	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggungjawab
	Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Kepala Daerah					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 3,060,000	
25	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	$(\sum(\text{Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan})) / (\sum(\text{Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan})) \times 100\%$	100	8	Persen	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 182,988,000	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
26	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	$(\sum(\text{Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan yang dilaksanakan})) / (\sum(\text{Urusan Pemerintahan Umum yang ditugaskan})) \times 100\%$	100	8	Persen	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Rp 182,988,000	
27	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	$(\sum(\text{Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti})) / (\sum(\text{Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang diterima})) \times 100\%$	100	25	Persen	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun	Rp 99,650,000	

No	Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Target Triwulanan	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggungjawab
28	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan	$(\sum(\text{Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum yang diberikan Sesuai Standar Pelayanan})) / (\sum(\text{Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum yang diterima})) \times 100\%$	100	25	Persen	1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
							Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Rp 58,548,000	
							Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 24,790,000	
29	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	$(\sum(\text{Desa yang memiliki tata Kelola Administrasi yang baik})) / (\sum(\text{Desa di wilayah Kecamatan})) \times 100\%$	100	25	Persen	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 27,446,000	
30	Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	$(\sum(\text{Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan yang terlaksana})) / (\sum(\text{Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan yang direncanakan})) \times 100\%$	100	25	Persen	Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp 27,446,000	
							Fasilitas administrasi tata pemerintahan desa	Rp 27,446,000	
31	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan = $(\sum(\text{Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan})) / (\sum(\text{Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang direncanakan})) \times 100\%$	100	25	Persen	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 755,764,120	LURAH GAMBUT

No	Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Target Triwulanan	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggungjawab
32	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti = $(\sum(\text{Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti}) / (\sum(\text{Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang diterima})) \times 100$	100	25	Persen			
33	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang mudah diakses	10	-	Pelayanan			
34	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan = $(\sum(\text{Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang diberikan Sesuai Standar Pelayanan})) / (\sum(\text{Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang diterima})) \times 100\%$	100	25	Persen			
35	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	$(\sum(\text{Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai Ketentuan})) / (\sum(\text{Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun})) \times 100\%$	100	25	Persen	Evaluasi Kelurahan	Rp 198,716,120	Sekretariat Kelurahan Gambut
36	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	$(\sum(\text{Dokumen keuangan dan aset yang disusun sesuai ketentuan})) / (\sum(\text{Dokumen keuangan dan aset yang disusun})) \times 100\%$	100	25	Persen			
37	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	$(\sum(\text{Administrasi Umum yang terfasilitasi})) / (\sum(\text{Administrasi Umum yang dibutuhkan})) \times 100\%$	100	25	Persen			

No	Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Target Triwulanan	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggungjawab
38	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	$(\sum \text{Realisasi BMD}) / (\sum \text{BMD yang direncanakan}) \times 100\%$	100	25	Persen			
39	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	$(\sum (\text{Jasa Penunjang yang terpenuhi})) / (\sum (\text{Jasa penunjang yang harus dipenuhi})) \times 100\%$	100	25	Persen			
40	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	$(\sum \text{BMD yang terpelihara}) / (\sum (\text{Pemeliharaan BMD yang direncanakan})) \times 100\%$	100	25	Persen			
41	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	-	Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp 5,150,000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gambut
42	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	-	Unit	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 200,000,000	
43	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	-	Pokmas / Ormas	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 106,938,000	
44	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	-	Pokmas / Ormas	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 12,960,000	

No	Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Target Triwulanan	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggungjawab
45	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	-	Pokmas / Ormas	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 232,000,000	Kasi Pemerintahan Kelurahan Gambut
46	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan = $\frac{(\sum (\text{Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan}))}{(\sum (\text{Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang direncanakan}))} \times 100\%$	100	25	Persen	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 725,282,500	LURAH GAMBUT BARAT
47	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti = $\frac{(\sum (\text{Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti}))}{(\sum (\text{Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang diterima}))} \times 100$	100	25	Persen			
48	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang mudah diakses	10	-	Pelayanan			
49	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan = $\frac{(\sum (\text{Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang diberikan Sesuai Standar Pelayanan}))}{(\sum (\text{Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang diterima}))} \times 100\%$	100	25	Persen			

No	Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Target Triwulanan	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggungjawab
50	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	$(\sum(\text{Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai Ketentuan})) / (\sum(\text{Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun})) \times 100\%$	100	25	Persen	Evaluasi Kelurahan	Rp 197,335,500	Sekretariat Kelurahan Gambut Barat
51	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	$(\sum(\text{Dokumen keuangan dan aset yang disusun sesuai ketentuan})) / (\sum(\text{Dokumen keuangan dan aset yang disusun})) \times 100\%$	100	25	Persen			
52	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terselenggaranya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	$(\sum(\text{Administrasi Umum yang terfasilitasi})) / (\sum(\text{Administrasi Umum yang dibutuhkan})) \times 100\%$	100	25	Persen			
53	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	$(\sum(\text{Realisasi BMD})) / (\sum(\text{BMD yang direncanakan})) \times 100\%$	100	25	Persen			
54	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	$(\sum(\text{Jasa Penunjang yang terpenuhi})) / (\sum(\text{Jasa penunjang yang harus dipenuhi})) \times 100\%$	100	25	Persen			
55	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	$(\sum(\text{BMD yang terpelihara})) / (\sum(\text{Pemeliharaan BMD yang direncanakan})) \times 100\%$	100	25	Persen			

No	Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Target Triwulanan	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggungjawab
56	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	-	Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp 5,150,000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gambut Barat
57	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	-	Unit	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 161,688,000	
58	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	-	Pokmas / Ormas	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 212,909,000	
59	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	-	Pokmas / Ormas	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 7,800,000	Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Gambut Barat
60	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	-	Pokmas / Ormas	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 140,400,000	Kasi Pemerintahan Kelurahan Gambut Barat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Gambut

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dituangkan dalam rencana kerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan kinerja sasaran dengan memanfaatkan data pencapaian kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data pencapaian hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Gambut Kab. Banjar tahun 2026 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya pada Triwulan I dirinci dalam tabel berikut :

Tabel 3 1 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Kinerja Kecamatan Gambut

No	Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target s.d Triwulan I	Satuan	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian (%)	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	Nilai	NA	NA	
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	NA	Nilai	NA	NA	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	Nilai	NA	NA	
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut	NA	Indeks	NA	NA	
5	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	30	Persen	15	50	
6	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	26.32	Persen	26.32	100	
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	25	Persen	25	100	
8	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	40	Persen	40	100	
9	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitasi Umum Perkantoran	25	Persen	20	80	
10	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100	Persen	100	100	
11	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	25	Persen	25	100	

No	Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target s.d Triwulan I	Satuan	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian (%)	Ket
12	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	24.45	Persen	24.45	100	
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	15	Persen	15	100	
14	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10	Persen	10	100	
15	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	25	Persen	25	100	
16	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	15	Persen	15	100	
17	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	42	Persen	42	100	
18	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60	Persen	60	100	
19	Terselenggaranya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	24	Persen	24	100	
20	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	NA	Persen	NA	NA	
21	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	NA	Persen	NA	NA	
22	Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	25	Persen	25	100	

No	Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target s.d Triwulan I	Satuan	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian (%)	Ket
23	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Pelayanan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang sesuai dengan Standar Pelayanan	25	Persen	25	100	
24	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	NA	Persen	NA	NA	
25	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	8	Persen	8	100	
26	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8	Persen	8	100	
27	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	25	Persen	25	100	
28	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan	25	Persen	25	100	
29	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	28.57	Persen	28.57	100	
30	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.57	Persen	28.57	100	
31	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10	Persen	10	100	
32	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	25	Persen	25	100	
33	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses	NA	Persen	NA	NA	

No	Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target s.d Triwulan I	Satuan	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian (%)	Ket
34	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan dan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	25	Persen	25	100	
35	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	25	Persen	25	100	
36	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	25	Persen	25	100	
37	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminstrasi Umum Perkantoran	25	Persen	25	100	
38	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	25	Persen	25	100	
39	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	25	Persen	25	100	
40	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	25	Persen	25	100	
41	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	NA	Lembaga Kemasyar akatan	NA	NA	
42	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	NA	Unit	NA	NA	
43	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	NA	Pokmas/ Ormas	NA	NA	
44	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	NA	Pokmas/ Ormas	NA	NA	

No	Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target s.d Triwulan I	Satuan	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian (%)	Ket
		Masyarakat di Kelurahan					
45	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	NA	Pokmas/ Ormas	NA	NA	
46	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	25	Persen	25	100	
47	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	25	Persen	25	100	
48	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses	NA	Pelayana n	NA	NA	
49	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	25	Persen	25	100	
50	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	25	Persen	25	100	
51	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	25	Persen	25	100	
52	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminitrasi Umum Perkantoran	25	Persen	25	100	
53	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	25	Persen	25	100	
54	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	25	Persen	25	100	
55	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	25	Persen	25	100	

No	Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target s.d Triwulan I	Satuan	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian (%)	Ket
56	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	NA	Lembaga Kemasyarakatan	NA	NA	
57	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	NA	Unit	NA	NA	
58	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	NA	Pokmas/Ormas	NA	NA	
59	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	NA	Pokmas/Ormas	NA	NA	
60	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	NA	Pokmas/Ormas	NA	NA	

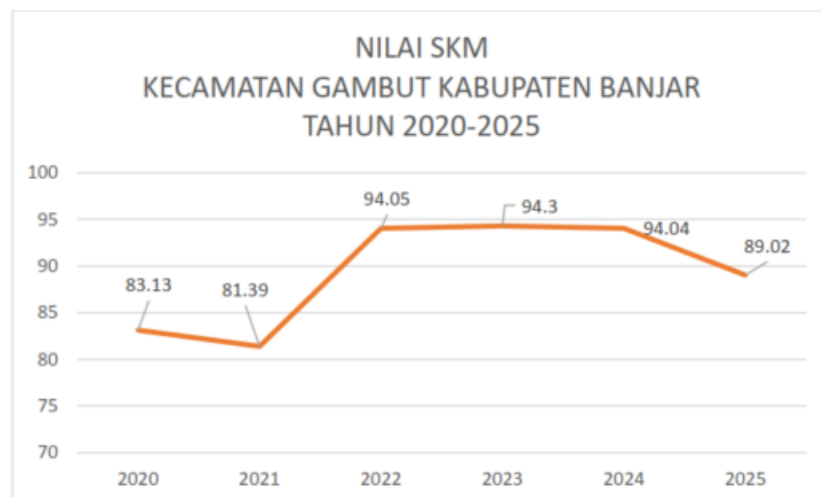
- **narasi/keterangan tentang hasil capaian target kinerja dari sasaran strategis (sasaran kepala perangkat daerah) sampai sasaran kinerja level ess IV)**

1. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan adalah kondisi meningkatnya mutu penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kecamatan Gambut yang ditandai dengan pelayanan yang lebih cepat, tepat, mudah, transparan, responsif, serta sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun indikator pada sasaran ini yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan formulasi perhitungan :

$$IKM = \frac{\sum Total\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{\sum Unsur\ yang\ terisi} \times 25$$

Pada triwulan I ini indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum dapat disajikan dikarenakan penilaian IKM dilaksanakan pada triwulan IV. Namun demikian, telah dilaksanakan kegiatan pengumpulan kuesioner dalam rangka penilaian IKM Tahun 2026 serta dapat disajikan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gambut pada Periode Tahun 2020 – 2025.

Gambar 3.1 Nilai SKM Kecamatan Gambut Tahun 2020-2025



Berdasarkan gambar 3.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga tahun 2024 pada Kantor Kecamatan Gambut. Namun, pada Tahun 2025 penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Gambut mengalami penurunan kinerja dengan nilai 89,02. Hal ini dikarenakan, adanya penurunan pada beberapa unsur pelayanan di Kecamatan Gambut

2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi Kecamatan dapat diperoleh dengan formulasi perhitungan

$$\text{Nilai Evaluasi Kecamatan} = \left(\frac{\sum \text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\sum \text{Total Unsur yang terisi}} \right) \times 100\%$$

Pada triwulan I indikator Nilai Evaluasi Kecamatan belum dapat disajikan dikarenakan penilaian EKK dilaksanakan pada triwulan IV. Namun demikian, dapat disajikan hasil Nilai Evaluasi Kecamatan Kecamatan Gambut pada Tahun 2022 – 2025.

Tabel 3.2 Nilai Evaluasi Kecamatan Kecamatan Gambut Tahun 2022 – 2025

Tahun	2022	2023	2024	2025
Nilai	76,82	77,36	96,67	95,42

Berdasarkan tabel di atas, Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2022 – 2025 mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa kinerja yang optimal, tata Kelola yang efektif serta komitmen yang kuat terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah. Dengan peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, diharapkan Kecamatan mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam mengakselerasi penyelenggaraan program Pembangunan serta menyelaraskan fungsi pengoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan yang tercermin dalam Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP Perangkat Daerah menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kinerja kecamatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan bahwa kecamatan mampu mengelola anggaran dan sumber daya dengan lebih baik, serta menyusun program-program yang relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pemerintahan. Dengan peningkatan akuntabilitas ini, masyarakat dapat melihat bukti nyata dari kinerja pemerintah kecamatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan.

Pada triwulan I indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum dapat disajikan dikarenakan penilaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah dilaksanakan pada triwulan III. Namun demikian, dapat disajikan hasil Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2024 – 2025.

Tabel 3.3 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2025

Tahun	2024	2025
Nilai	79,56	76,82

Berdasarkan tabel di atas, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2024. Adapun rincian nilai per komponen yaitu :

- Perencanaan Kinerja Tahun 2024 diperoleh nilai 23,62 dan Tahun 2025 diperoleh nilai 25,20
 - Pengukuran Kinerja Tahun 2024 diperoleh nilai 23,00 dan Tahun 2025 diperoleh nilai 21,95
 - Pelaporan kinerja Tahun 2024 diperoleh nilai 13,07 dan Tahun 2025 diperoleh nilai 11,46
 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024 diperoleh nilai 19,87 dan Tahun 2025 diperoleh nilai 18,22
4. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Kecamatan Gambut dengan Indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut, sasaran ini merupakan sasaran kinerja Sekretaris Kecamatan Gambut, capaian masih kosong dikarenakan penilaian dilaksanakan pada triwulan IV.

Dalam rangka persiapan penilaian dimana Penilaian Mandiri Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) dilakukan terhadap unsur Kinerja Utama, Kepatuhan dan Kinerja Pelayanan Publik, meliputi:

1. Kinerja Utama
 - a. sasaran strategis;
 - b. strategi dan pencapaian Kinerja; dan
 - c. pelaporan Kinerja.
2. Kepatuhan
 - a. proses bisnis dan tata laksana;
 - b. tata kelola pengadaan barang dan jasa;

- c. implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - d. keandalan laporan keuangan;
 - e. pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f. efektivitas pengendalian korupsi; dan
 - g. manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Kinerja Pelayanan publik
- a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - b. inovasi pelayanan publik;
 - c. keterbukaan informasi publik;
 - d. standar pelayanan publik; dan
 - e. pelayanan pengaduan.
5. Sasaran Kinerja Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan, dengan target sampai dengan Triwulan I sebesar 30%, realisasi capaian 15% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 50%. Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi :
- a. Penyusunan dokumen Ranwal Rencana Kerja Tahun 2027
 - b. Penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahun 2027
 - c. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026
 - d. Penyusunan dokumen KAK Tahun 2027
 - e. Penyusunan LkjIP Tahun 2025
 - f. Penyusunan DPA Murni Tahun 2026
 - g. Penyusunan RFK Januari-Maret Tahun 2026
6. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas dengan Indikator kinerja Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan dengan target 26,32%, realisasi capaian 26,32% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%. Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas meliputi :
- a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN yang dilakukan setiap bulan
 - b. Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - c. Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun Unaudited.

7. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah dengan target 25%, realisasi capaian 25% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yaitu penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang dilaksanakan setiap bulan dengan target 12 laporan selama 1 tahun.

8. Sasaran Kinerja Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu dengan target 40%, realisasi capaian 40% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah meliputi :

- a. Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dengan target 3 dokumen pada triwulan I

9. Sasaran Kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor dengan indikator Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran dengan target 25%, realisasi capaian 20% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 80%.

Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor meliputi :

- a. Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor target 3 paket pada triwulan I, namun belum dilaksanakan.
- b. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor terealisasi 1 paket hingga triwulan I.
- c. Penyediaan peralatan rumah tangga terealisasi terealisasi 1 paket hingga triwulan I
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terealisasi terealisasi 1 paket hingga triwulan I
- e. Fasilitasi kunjungan tamu terealisasi 3 laporan hingga triwulan I
- f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD terealisasi 3 laporan hingga triwulan I
- g. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD terealisasi pada triwulan II.

10. Sasaran Kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan dengan target sampai dengan triwulan I sebesar 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan meliputi :

- a. Pengadaan mebel telah terealisasi 34 unit
- b. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya telah terealisasi sebanyak 14 unit.

11. Sasaran Kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dengan target 25%, realisasi capaian 25% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat telah terealisasi 3 laporan
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik telah terealisasi pada triwulan II
- c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor terealisasi 3 laporan

12. Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan target 24,45%, realisasi capaian 24,45% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan meliputi :

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan target di akhir triwulan IV.
- b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya telah terealisasi 7 unit hingga triwulan I.
- c. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya target di akhir triwulan IV

13. Sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan indikator kinerja Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan

standar pelayanan target 15%, realisasi capaian 15% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yaitu

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

14. Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan indikator Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan target 25% telah terealisasi sebesar 25% dengan capaian 100%.

15. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan target 25% telah terealisasi sebesar 25% dengan capaian 100%.

Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini yaitu Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan target 3 laporan dan telah terealisasi pada triwulan I.

16. Sasaran Kinerja Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan indikator kinerja Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat target 15%, realisasi capaian 15% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan telah terealisasi 1 laporan hingga triwulan I.

17. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana dengan target 42%, realisasi capaian 42% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat meliputi :

- a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

b. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

18. Sasaran Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator persentase kegiatan pemberdayaan desa dengan target 60%, realisasi 60% dan capaian kinerja sebesar 100% .

Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat meliputi :

- Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa telah terealisasi pada triwulan I.
- Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan telah terealisasi 1 laporan hingga triwulan I.

19. Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase terlaksananya Program Pokok PKK target 24%, realisasi 24% dan capaian kinerja 100%.

Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan yaitu Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok Masyarakat dengan target pada akhir triwulan IV.

20. Sasaran Kinerja Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum dengan indikator kinerja Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan gambut telah ditindaklanjuti.

21. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan target dan realisasi diperoleh pada triwulan II dan triwulan III.

22. Sasaran kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti dengan target 25% realisasi 25% dan capaian kinerja 100%.

23. Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban dengan indikator Persentase Pelayanan

Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang sesuai dengan Standar Pelayanan dengan target 25% realisasi 25% dan capaian kinerja 100%.

24. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan target dan realisasi diperoleh pada triwulan III..

25. Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum dengan target 8% realisasi 8% dan capaian kinerja 100%.

Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum meliputi :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

26. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan target 8% realisasi 8% dan capaian kinerja 100%.

Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yaitu :

a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan aktivitas Pelaksanaan HUT RI dan akan terealisasi pada triwulan III bulan Agustus.

b. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

27. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti yang Baik dengan target 25% realisasi 25% dan capaian kinerja 100% .

28. Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan dengan target 25% realisasi 25% dan capaian kinerja 100% .

29. Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Desa yang Memiliki Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik target 28,57%, realisasi 28,57% dan capaian kinerja 100%.

Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa yaitu :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

30. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target 28,57%, realisasi 28,57% dan capaian kinerja 100%.

Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa meliputi :

a. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang telah terealisasi 1 laporan pada triwulan I yaitu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

31. Sasaran Kinerja Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan Gambut diarahkan pada peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan, penanganan pengaduan, kemudahan akses pelayanan, serta penerapan standar pelayanan urusan pemberdayaan kelurahan. Adapun indikatornya yaitu Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan target 10%, realisasi 10% dan capaian kinerja 100%.

32. Sasaran kinerja Meningkatnya Pengaduan **Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut** yang ditindaklanjuti bertujuan meningkatkan tindak lanjut pengaduan masyarakat di kelurahan Gambut. Adapun indikatornya yaitu Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut yang ditindaklanjuti dengan target 25% realisasi 25% dan capaian kinerja 100%.

33. Sasaran kinerja Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan **Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut** diarahkan untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh pelayanan pemberdayaan kelurahan secara mudah, cepat, dan merata. Kemudahan akses pelayanan diwujudkan melalui penyediaan mekanisme pelayanan yang sederhana, informasi yang jelas, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun indikatornya yaitu Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut yang Mudah diakses dengan target dan realisasi diperoleh pada triwulan IV.
34. Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan **Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut** diarahkan untuk menjamin pelayanan pemerintahan umum sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Adapun indikatornya yaitu Persentase Pelayanan **Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut** yang sesuai dengan Standar Pelayanan dengan target 25% realisasi 25% dan capaian kinerja 100%.
35. Sasaran kinerja Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan dengan target 25% realisasi 25% dan capaian kinerja 100%.
36. Sasaran kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan dengan target 25% realisasi 25% dan capaian kinerja 100%.
37. Sasaran kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor dengan indikator kinerja Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran dengan target 25% realisasi 25% dan capaian kinerja 100%.
38. Sasaran kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan dengan target 25% realisasi 25% dan capaian kinerja 100%.
39. Sasaran kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dengan target 25% realisasi 25% dan capaian kinerja 100%.

40. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan target 25% realisasi 25% dan capaian kinerja 100%.
41. Sasaran kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gambut bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat dengan indikator Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan target dan realisasi pada triwulan IV.
42. Sasaran kinerja Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Gambut bertujuan mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan melalui pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dengan target dan realisasi pada triwulan IV.
43. Sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan diarahkan pada peningkatan peran kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan target dan realisasi pada triwulan IV.

Adapun yang mendukung sasaran kinerja yang diampu oleh Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Gambut ini yaitu :

- a. Pelaksanaan Posyandu Balita;
 - b. Pelaksanaan Posyandu Lansia;
 - c. Pelaksanaan Rembuk Stunting;
44. Sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan diarahkan pada peningkatan peran kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan target dan realisasi pada triwulan IV.

Adapun yang mendukung sasaran kinerja yang diampu oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Gambut ini yaitu :

- a. Pelaksanaan Koordinasi RT;
- b. Pelaksanaan Koordinasi RW; dan
- c. Pelaksanaan koordinasi Linmas

45. Sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan diarahkan pada peningkatan peran kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan target dan realisasi pada triwulan IV.

Adapun yang mendukung sasaran kinerja yang diampu oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gambut ini yaitu Pelaksanaan PKK Kelurahan.

46. Sasaran Kinerja Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan **kelurahan Gambut Barat** diarahkan pada peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan, penanganan pengaduan, kemudahan akses pelayanan, serta penerapan standar pelayanan urusan pemberdayaan kelurahan. Adapun indikatornya yaitu Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan target 10%, realisasi 10% dan capaian kinerja 100%.

47. Sasaran kinerja Meningkatnya Pengaduan **Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut Barat** yang ditindaklanjuti bertujuan meningkatkan tindak lanjut pengaduan masyarakat di kelurahan Gambut. Adapun indikatornya yaitu Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut yang ditindaklanjuti dengan target 25% realisasi 25% dan capaian kinerja 100%.

48. Sasaran kinerja Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan **Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut Barat** diarahkan untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh pelayanan pemberdayaan kelurahan secara mudah, cepat, dan merata. Kemudahan akses pelayanan diwujudkan melalui penyediaan mekanisme pelayanan yang sederhana, informasi yang jelas, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun indikatornya yaitu Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut yang Mudah diakses dengan target dan realisasi diperoleh pada triwulan IV.

49. Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan **Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut Barat** diarahkan untuk

menjamin pelayanan pemerintahan umum sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Adapun indikatornya yaitu Persentase Pelayanan **Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut Barat** yang sesuai dengan Standar Pelayanan dengan target 25% realisasi 25% dan capaian kinerja 100%.

50. Sasaran kinerja Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah **Kelurahan Gambut Barat** yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan dengan target 25% realisasi 25% dan capaian kinerja 100%.
51. Sasaran kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah **Kelurahan Gambut Barat** yang Berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan dengan target 25% realisasi 25% dan capaian kinerja 100%.
52. Sasaran kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor **Kelurahan Gambut Barat** dengan indikator kinerja Persentase Terasilinasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminstrasi Umum Perkantoran dengan target 25% realisasi 25% dan capaian kinerja 100%.
53. Sasaran kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan **Kelurahan Gambut Barat** dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan dengan target 25% realisasi 25% dan capaian kinerja 100%.
54. Sasaran kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah **Kelurahan Gambut Barat** dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dengan target 25% realisasi 25% dan capaian kinerja 100%.
55. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan **Kelurahan Gambut Barat** dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan target 25% realisasi 25% dan capaian kinerja 100%.
56. Sasaran kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di **Kelurahan Gambut Barat** bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat dengan indikator Jumlah

Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan target dan realisasi pada triwulan IV.

57. Sasaran kinerja Terbangunnya Sarana dan Prasarana **Kelurahan Gambut Barat** bertujuan mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan melalui pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dengan target dan realisasi pada triwulan IV.

58. Sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di **Kelurahan Gambut Barat** diarahkan pada peningkatan peran kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan target dan realisasi pada triwulan IV.

Adapun yang mendukung sasaran kinerja yang diampu oleh Kasi Kesejahteraan Sosial **Kelurahan Gambut Barat** ini yaitu :

- a. Pelaksanaan Posyandu Balita;
- b. Pelaksanaan Posyandu Lansia;
- c. Pelaksanaan Rembuk Stunting;

59. Sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di **Kelurahan Gambut Barat** diarahkan pada peningkatan peran kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan target dan realisasi pada triwulan IV.

Adapun yang mendukung sasaran kinerja yang diampu oleh Kasi Pemerintahan **Kelurahan Gambut Barat** ini yaitu :

- a. Pelaksanaan Koordinasi RT;
- b. Pelaksanaan Koordinasi RW; dan
- c. Pelaksanaan koordinasi Linmas

60. Sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di **Kelurahan Gambut Barat** diarahkan pada peningkatan peran kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang

Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan target dan realisasi pada triwulan IV.

Adapun yang mendukung sasaran kinerja yang diampu oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gambut ini yaitu Pelaksanaan PKK Kelurahan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan**

Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), belum bisa menyajikan faktor pendorong dan faktor penghambat dikarenakan penilaian IKM dilaksanakan pada triwulan IV.

- 2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**

Sasaran kinerja meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi Kecamatan belum dapat disajikan karena pelaksanaan penilaian evaluasi Kecamatan pada triwulan IV.

- 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**

Sasaran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan indikator Predikat SAKIP, belum bisa menyajikan faktor pendorong dan faktor penghambat dikarenakan hasil penilaian dilaksanakan pada triwulan IV.

- 4. Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern**

Sasaran Kinerja Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern dengan indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) belum bisa menyajikan faktor pendorong dan faktor penghambat dikarenakan penilaian dilakukan pada triwulan IV.

- 5. Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**

Sasaran Kinerja Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas Daerah dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan memiliki faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

Faktor Pendukung :

- *Kompetensi SDM pada Bag Perencanaan yang sudah terbiasa menyusun dokumen perencanaan tahunan*

- *Ketersediaan data kinerja yang akurat pada Renstra*
- *Koordinasi yang baik dengan Bappedalitbang*
- *Respon yang baik dari Bagian Organisasi dalam menindaklanjuti kendala dalam menyusun LKjIP*
- *Kelurahan yang aktif dalam membantu pada pemenuhan data dukung*

Faktor Penghambat :

- *Koordinasi antar unit yang belum optimal, terutama dalam penyelarasan indikator dan target kinerja*
- *Keterbatasan waktu penyusunan, terutama ketika jadwal beririsan dengan kegiatan lain*
- *Proses penandatanganan yang lama, sehingga pendokumentasian DPA terlambat*
- *Adanya revisi dikarenakan ketidaksesuaian dengan template*
- *Menunggu laporan kinerja sasaran Kelurahan, sehingga penyelesaian laporan mendekati batas waktu*

Solusi Alternatif:

- *Lakukan rapat internal.*
- *Lakukan koordinasi aktif dengan kelurahan.*

6. Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas

Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas dengan indikator Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan memiliki faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

Faktor Pendukung :

- *Ketersediaan anggaran yang memadai dalam DPA sehingga pembayaran gaji sesuai*
- *Data kepegawaian yang relatif valid dan mutakhir*

Faktor Penghambat :

- *Beban kerja tinggi dengan jumlah PNS (Benahara) yang terbatas*
- *ingginya Deviasi antara Target Fisik, Keuangan dengan Realisasi Fisik, Keuangan*
- *Dokumen Pengajuan Tidak Lengkap atau Tidak Sesuai*

- *Adanya perubahan aturan yang belum dipahami secara menyeluruh*
- *Kurangnya pengawasan Internal*

Solusi Alternatif:

- *Lakukan verifikasi pada setiap SPJ*
- *Tingkatkan pengawasan internal*

7. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah

Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah memiliki faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

Faktor Pendukung :

- *Adanya stock opname dan rekonsiliasi rutin*
- *Koordinasi yang baik dengan BPKPAD bidang Aset*

Faktor Penghambat :

- *Tingginya beban kerja pengurus barang sehingga kurang optimal*

Solusi Alternatif:

- *Koordinasikan dengan atasan jika terdapat kendala*

8. Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran Kinerja Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu memiliki faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

Faktor Pendukung :

- *Terdapat Dokumen Perencanaan IKU dan PK untuk menselaraskan penyusunan SKP*

Faktor Penghambat :

- *Adanya beban kerja yang tinggi, sehingga Pegawai terfokus pada pekerjaan operasional*

Solusi Alternatif:

- *mengusulkan penambahan pegawai.*

9. Terselenggaranya kegiatan kantor

Sasaran Kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor dengan indikator Persentase Persentase Terasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang

Administarsi Umum Perkantoran memiliki faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

Faktor Pendukung :

- *Ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan*
- *Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung rapat koordinasi*
- *Koordinasi yang baik antar unit dan lintas sektor*

Faktor Penghambat :

- *Padatnya kegiatan pengampu kegiatan, sehingga belum dapat merealisasikan hingga bulan Maret*
- *Kunjungan yang bersifat tiba-tiba menyebabkan persiapan kurang maksimal*
- *Undangan rapat yang dijadwalkan di waktu yang bersamaan sehingga salah satu nya tidak dapat dihadiri*
- *Kondisi geografis dan cuaca, yang dapat menghambat kelancaran perjalanan dinas*

Solusi Alternatif :

- *lakukan pengaturan jadwal yang lebih terstruktur*
- *lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.*

10. Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan

Sasaran Kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan memiliki faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

Faktor Pendukung :

- *Dokumen pengadaan yang telah disiapkan di awal oleh PPK*
- *Ketersediaan penyedia/rekanan yang kompeten*
- *Koordinasi yang baik antara Pengurus Barang dan Pejabat Pengadaan*

Faktor Penghambat :

- *Keterlambatan pembayaran dari bendahara pengeluaran karena ketersediaan bendahara yang terbatas*
- *Penyedia terlambat melakukan pengiriman barang*

Solusi Alternatif :

- *Sebelum melaksanakan kegiatan agar melakukan pengecekan ketersediaan anggaran pada bendahara*

11. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi memiliki faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

Faktor Pendukung :

- *Ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung layanan surat menyurat*
- *SDM yang kompeten*

Faktor Penghambat :

- *Belum optimalnya penerapan persuratan elektronik, sehingga sebagian proses masih dilakukan secara manual*
- *Pembayaran Tagihan Air belum terbayarkan ub. Februari*

Solusi Alternatif :

- *Buat memo pengingat terkait pembayaran rutin*

12. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan

Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara memiliki faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

Faktor Pendukung :

- *Ketersediaan anggaran pemeliharaan yang memadai*
- *Komitmen pimpinan dan pegawai dalam menjaga dan menggunakan kendaraan dinas sesuai ketentuan*

Faktor Penghambat :

- *Frekuensi penggunaan kendaraan yang tinggi, sehingga mempercepat tingkat keausan*
- *Kondisi jalan dan cuaca, yang dapat memengaruhi tingkat kerusakan kendaraan*
- *Kerusakan Peralatan kantor yang tidak bisa diprediksi*
- *Kurang perhatiannya pengguna pada peralatan kantor*
- *Proses administrasi atau pengadaan yang memakan waktu menghambat penanganan kerusakan secara cepat.*

Solusi Alternatif :

- *Peningkatan Kesadaran dan Tanggung Jawab Pengguna*

13. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik

Sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan indikator Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan memiliki faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

Faktor Pendukung :

- *Pimpinan aktif mendorong koordinasi lintas unit dan memastikan fasilitasi berjalan optimal*

Faktor Penghambat :

- *Jumlah pegawai terbatas dan beban kerja tinggi sehingga koordinasi belum optimal*

Solusi Alternatif :

- *Akan dibuat usulan penambahan pegawai*

14. Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan indikator Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan memiliki faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

Faktor Pendukung :

- *Koordinasi yang baik dengan Pimpinan*
- *Adanya arahan Pimpinan untuk melakukan penjadwalan ulang*

Faktor Penghambat :

- *Padatnya kegiatan pengampu kegiatan, sehingga belum dapat merealisasikan hingga bulan Maret*

Solusi Alternatif :

Koordinasikan dengan Pimpinan jika terdapat kendala.

15. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan memiliki faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut

Faktor Pendukung :

- *Tersedianya fasilitas seperti ruang pelayanan, komputer, dan jaringan internet*

- *Terjalinnnya komunikasi yang efektif antar bagian*

Faktor Penghambat :

- *Jumlah atau kompetensi pegawai belum memadai untuk melaksanakan monitoring secara optimal*

Solusi Alternatif :

Akan dibuat usulan penambahan pegawai.

16. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sasaran Kinerja Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan indikator Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat memiliki faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

Faktor Pendukung :

- *Jadwal kegiatan yang telah tersusun*
- *Koordinasi yang baik antar unit dan lintas sektor*

Faktor Penghambat :

- *Pada pelaksanaan safari ramadhan Waktu pelaksanaan yang singkat (antara berbuka hingga tarawih) membatasi rangkaian acara*

Solusi Alternatif :

Buat laporan kegiatan sebagai bahan evaluasi.

17. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Sasaran Kinerja Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dengan indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana memiliki faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

Faktor Pendukung :

- *Adanya dukungan penuh dari pimpinan dalam mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat*

Faktor Penghambat :

- *Jumlah aparatur masih terbatas.*

Solusi Alternatif :

- *Akan diusulkan penambahan pegawai*

18. Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan indikator Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa memiliki faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

- *Komunikasi yang efektif antara camat, perangkat kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya*
- *Tersedianya data dan informasi yang lengkap terkait kebutuhan dan potensi wilayah*

Faktor Penghambat :

- *Adanya ketidaksesuaian usulan Desa/Kelurahan*
- *Pengampu kegiatan yang masih kosong dan diisi oleh Plt sehingga kurang optimal*
- *Penyusunan Laporan yang terkendala karena Peraturan yang belum ditetapkan*

Solusi Alternatif :

- *Buat laporan kegiatan sebagai bahan evaluasi*

19. Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan

Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dengan indikator Persentase terlaksananya Program Pokok PKK memiliki faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

Faktor Pendukung :

- *Jadwal kegiatan yang telah tersusun*
- *Koordinasi yang baik antar unit dan lintas sektor*

Faktor Penghambat :

- *Pengampu kegiatan yang masih kosong dan diisi oleh Plt sehingga kurang optimal*
- *Penyusunan Laporan yang terkendala karena Peraturan yang belum ditetapkan*

Solusi Alternatif :

- *Koordinasikan dengan Pimpinan jika terdapat kendala*

20. Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Sasaran Kinerja Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti memiliki faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

Faktor Pendukung :

- *Petugas sigap dalam menerima laporan dan segera menindaklanjuti kejadian*
- *Koordinasi Lintas Sektor yang Baik*

Faktor Penghambat :

- *belum adanya faktor penghambat, karena kegiatan Seksi Trantib terlaksana pada triwulan II*

Solusi Alternatif :

Siapkan rencana kegiatan

21. Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum memiliki faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

Faktor Pendukung :

- *Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung belum dapat disampaikan, karena kegiatan berjalan pada triwulan II*

Faktor Penghambat :

- *Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung belum dapat disampaikan, karena kegiatan berjalan pada triwulan II*

Solusi Alternatif :

- *Siapkan rencana kegiatan*

22. Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti

Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti memiliki faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

Faktor Pendukung :

- *Adanya SOP yang jelas dalam penanganan pengaduan*
- *Koordinasi yang baik antara kecamatan, kelurahan/desa, dan instansi terkait*

Faktor Penghambat :

- *Keterbatasan SDM*

Solusi Alternatif :

- *Akan dibuat usulan penambahan pegawai*

23. Meningkatkan Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Ketentraman dan Ketertiban

Sasaran Kinerja Meningkatkan Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Ketentraman dan Ketertiban dengan indikator Persentase Pelayanan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang sesuai dengan Standar Pelayanan memiliki faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

Faktor Pendukung :

- *Tersedianya Standar Pelayanan (SP) dan SOP yang jelas sebagai acuan dalam pemberian layanan*
- *Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan*

Faktor Penghambat :

- *Keterbatasan SDM*

Solusi Alternatif :

- *Akan dibuat usulan penambahan pegawai*

24. Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah belum dapat menyajikan faktor pendukung dan faktor penghambat dikarenakan kegiatan dilaksanakan pada triwulan II .

25. Meningkatkan koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Sasaran Kinerja Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan indikator Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana memiliki faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

Faktor Pendukung :

- *Jadwal kegiatan yang telah tersusun*

Faktor Penghambat :

- *Adanya beberapa anggota yang diwakilkan kehadirannya dikarenakan adanya jadwal yang berbenturan*

Solusi Alternatif :

- *Pastikan keterwakilan hadir.*

26. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah memiliki faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut

Faktor Pendukung :

- *Jadwal kegiatan yang telah tersusun*

Faktor Penghambat :

- *Adanya beberapa anggota yang diwakilkan kehadirannya dikarenakan adanya jadwal yang berbenturan*

Solusi Alternatif :

- *Pastikan keterwakilan hadir.*

27. Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti

Sasaran kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti memiliki faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

Faktor Pendukung :

- *Adanya SOP yang jelas dalam penanganan pengaduan*
- *Koordinasi yang baik antara kecamatan, kelurahan/desa, dan instansi terkait*

Faktor Penghambat :

- *Keterbatasan SDM*

Solusi Alternatif :

- *Akan dibuat usulan penambahan pegawai*

28. Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum

Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan memiliki faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

Faktor Pendukung :

- Tersedianya Standar Pelayanan (SP) dan SOP yang jelas sebagai acuan dalam pemberian layanan
- Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan

Faktor Penghambat :

- Keterbatasan SDM

Solusi Alternatif :

- Akan dibuat usulan penambahan pegawai

29. Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Desa yang Memiliki Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik memiliki faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

- Koordinasi yang baik antar unit dan lintas sektor

Faktor Penghambat :

- Pengampu kegiatan yang masih kosong dan diisi oleh Plt sehingga kurang optimal

Solusi Alternatif :

- Koordinasikan dengan Pimpinan jika terdapat kendala

30. Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sasaran Kinerja Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa memiliki faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

Faktor Pendukung :

- Jadwal kegiatan yang telah tersusun
- Koordinasi yang baik dengan Pimpinan dan unit

Faktor Penghambat :

- Pengampu kegiatan yang masih kosong dan diisi oleh Plt sehingga kurang optimal

Solusi Alternatif :

- *Koordinasikan dengan Pimpinan jika terdapat kendala*

31. Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Lurah Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Lurah Gambut) dengan indikator Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Peran aktif Lurah Gambut dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat*
- *Dukungan dari kecamatan, perangkat daerah terkait, dan instansi vertikal dalam mendukung program pemberdayaan.*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Kesibukan masyarakat dan faktor ekonomi*
- *Koordinasi antar lembaga yang belum optimal.*

Solusi Alternatif

- *Melakukan penilaian terhadap efektivitas kegiatan pemberdayaan dan dampaknya bagi masyarakat*
- *Mengadakan rapat koordinasi berkala antara Lurah, perangkat kelurahan, dan lembaga kemasyarakatan*

32. Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti (Kelurahan Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti (Kelurahan Gambut) dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Koordinasi yang baik dengan lembaga kemasyarakatan seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), LPM, RT/RW, dan karang taruna dalam penyelesaian permasalahan*
- *Dukungan dari kecamatan dan perangkat daerah terkait.*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Beberapa pengaduan harus dikoordinasikan ke tingkat kecamatan atau perangkat daerah lain*

- *Dokumentasi pengaduan masih manual sehingga rawan keterlambatan pelaporan.*

Solusi Alternatif

- *Menjalin komunikasi intensif dengan kecamatan dan perangkat daerah untuk percepatan tindak lanjut*

33.Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut) dengan indikator Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat*
- *Aparatur kelurahan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan humanis*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, terutama jika keadaan sering hujan halaman Kelurahan tergenang air*
- *Tingkat literasi digital masyarakat yang beragam.*

Solusi Alternatif

Sosialisasi aktif melalui RT/RW dan lembaga kemasyarakatan

34.Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut) dengan indikator Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat*
- *Sinergi dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), LPM, dan RT/RW dalam mendukung kelancaran pelayanan pemberdayaan*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, terutama jika keadaan sering hujan halaman Kelurahan tergenang air*

- *Tidak semua warga memahami alur pelayanan atau persyaratan administrasi.*

Solusi Alternatif

Pengadaan perangkat pendukung pelayanan dan peningkatan kualitas ruang pelayanan

35. Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan (Kelurahan Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan (Kelurahan Gambut) dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Komitmen pimpinan dan perangkat kelurahan*
- *Penggunaan sistem informasi perencanaan dan keuangan daerah untuk meningkatkan akurasi dan transparansi*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Keterbatasan kapasitas SDM dalam perencanaan dan evaluasi*
- *Evaluasi lebih berfokus pada realisasi fisik dan keuangan dibanding outcome*
- *Ketidakselarasan dokumen Kelurahan terhadap dokumen Kecamatan*

Solusi Alternatif

- *Penguatan koordinasi dengan kecamatan dan perangkat daerah terkait*
- *Memastikan seluruh tahapan perencanaan dan pelaporan terdokumentasi secara digital*
- *Melakukan review triwulanan terhadap capaian program dan realisasi anggaran*

36. Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas (Kelurahan Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas (Kelurahan Gambut) dengan indikator Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Laporan realisasi anggaran dan administrasi keuangan disampaikan sesuai jadwal*
- *Pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan untuk pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan secara tertib*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Belum tertibnya pengelolaan keuangan di Kelurahan*
- *Dokumen dari pelaksana kegiatan tidak selalu disampaikan tepat waktu*

Solusi Alternatif

- *Melakukan pengecekan berkala atas kelengkapan dokumen dan kesesuaian pencatatan*
- *Koordinasi intensif dengan kecamatan dan BPKPAD*

37. Terselenggaranya kegiatan kantor (Kelurahan Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor (Kelurahan Gambut) dengan indikator Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Terjalinnnya komunikasi yang baik antara Lurah, Sekretaris, dan seluruh staf di Kelurahan Gambut*
- *Tersedianya ruang kerja, peralatan administrasi, dan fasilitas pendukung pelayanan*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Pegawai harus menangani beberapa pekerjaan sekaligus sehingga berpotensi menurunkan efektivitas*
- *Beban administrasi yang tinggi*

Solusi Alternatif

- *Mengoptimalkan peran masing-masing pegawai sesuai tupoksi*
- *Melaksanakan rapat internal secara berkala untuk memantau progres kegiatan*

38. Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan (Kelurahan Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan (Kelurahan Gambut) dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Penyusunan RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) berdasarkan analisis kebutuhan riil*
- *Pencatatan barang dilakukan secara berkala dan terdokumentasi dengan baik*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi dalam satu tahun anggaran*
- *Barang mengalami penurunan fungsi akibat usia pakai*

Solusi Alternatif

- *Mengutamakan barang yang mendukung pelayanan publik dan operasional utama*
- *Pemutakhiran data inventaris secara berkala*

39. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Gambut) dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Identifikasi kebutuhan jasa (listrik, air, internet, kebersihan, keamanan, dan jasa lainnya) dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional kantor*
- *Dukungan anggaran dalam DPA memungkinkan pembayaran jasa penunjang secara tepat waktu*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Kenaikan tarif jasa dapat mempengaruhi kecukupan anggaran*
- *Pemakaian berlebihan dapat meningkatkan beban biaya*

Solusi Alternatif

- *Pembayaran tagihan tepat waktu*
- *Melakukan review realisasi belanja jasa penunjang setiap triwulan*

40. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan (Kelurahan Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Koordinasi antara pengelola BMD dan unit kerja terkait;*
- *SDM yang kompeten dalam pengelolaan BMD*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Kondisi sebagian BMD yang sudah tua atau rusak berat;*
- *Banyaknya jumlah dan jenis BMD yang harus dipelihara; dan*
- *Kerusakan pada peralatan dan mesin yang tidak bisa diprediksi*

Upaya Perbaikan

- *Menyusun jadwal pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana;*
- *Koordinasi dengan bidang aset terkait penghapusan barang*

41. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Gambut) dengan indikator Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Lurah dan perangkat kelurahan mendorong dialog terbuka serta memberikan ruang penyampaian aspirasi*
- *Usulan masyarakat dibahas secara terbuka dan disampaikan kembali hasil prioritasnya.*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Tidak semua usulan dapat diakomodir sehingga dapat menurunkan antusiasme warga*
- *Usulan yang belum terealisasi dapat menimbulkan persepsi kurang efektifnya forum*

Solusi Alternatif

- *Memberikan pemahaman mengenai kewenangan, prioritas, dan mekanisme pengusulan*
- *Mengukur jumlah kehadiran dan kualitas usulan sebagai indikator peningkatan partisipasi*

42. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kasi Pemberdayaan Masyarakat / Kelurahan Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kasi Pemberdayaan Masyarakat / Kelurahan Gambut)

dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Pelaksanaan teknis didukung oleh instansi terkait sehingga sesuai spesifikasi*
- *Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Kondisi cuaca, lokasi, atau keterbatasan akses dapat menghambat pekerjaan*
- *Risiko kerusakan apabila tidak dirawat secara berkelanjutan*

Solusi Alternatif

- *Melakukan pengecekan progres fisik serta kualitas pekerjaan*

43. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Pemerintahan/Kelurahan Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Pemerintahan / Kelurahan Gambut) dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Sinergi dengan RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Kesibukan warga dalam bekerja membatasi waktu partisipasi*
- *Rendahnya keterampilan atau pemahaman dalam pengelolaan kegiatan.*

Solusi Alternatif

- *Memberikan pembinaan rutin kepada RT/RW, LPM, dan organisasi kemasyarakatan*

44. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Kesejahteraan Sosial/Kelurahan Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Kesejahteraan Sosial / Kelurahan Gambut) dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Sinergi dengan RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Kesibukan warga dalam bekerja membatasi waktu partisipasi*
- *Rendahnya keterampilan atau pemahaman dalam pengelolaan kegiatan.*

Solusi Alternatif

- *Memberikan pembinaan rutin kepada RT/RW, LPM, dan organisasi kemasyarakatan*

45. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Pemberdayaan Masyarakat/Kelurahan Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Pemberdayaan Masyarakat / Kelurahan Gambut) dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Sinergi dengan RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Kesibukan warga dalam bekerja membatasi waktu partisipasi*
- *Rendahnya keterampilan atau pemahaman dalam pengelolaan kegiatan.*

Solusi Alternatif

- *Memberikan pembinaan rutin kepada RT/RW, LPM, dan organisasi kemasyarakatan*

46. Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Lurah Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Lurah Gambut Barat) dengan indikator Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Peran aktif Lurah Gambut dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat*
- *Dukungan dari kecamatan, perangkat daerah terkait, dan instansi vertikal dalam mendukung program pemberdayaan.*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Kesibukan masyarakat dan faktor ekonomi*
- *Koordinasi antar lembaga yang belum optimal.*

Solusi Alternatif

- *Melakukan penilaian terhadap efektivitas kegiatan pemberdayaan dan dampaknya bagi masyarakat*
- *Mengadakan rapat koordinasi berkala antara Lurah, perangkat kelurahan, dan lembaga kemasyarakatan*

47. Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti (Kelurahan Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti (Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Koordinasi yang baik dengan lembaga kemasyarakatan seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), LPM, RT/RW, dan karang taruna dalam penyelesaian permasalahan*
- *Dukungan dari kecamatan dan perangkat daerah terkait.*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Beberapa pengaduan harus dikoordinasikan ke tingkat kecamatan atau perangkat daerah lain*
- *Dokumentasi pengaduan masih manual sehingga rawan keterlambatan pelaporan.*

Solusi Alternatif

- *Menjalin komunikasi intensif dengan kecamatan dan perangkat daerah untuk percepatan tindak lanjut*

48. Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat*
- *Aparatur kelurahan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan humanis*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, terutama jika keadaan sering hujan halaman Kelurahan tergenang air*
- *Tingkat literasi digital masyarakat yang beragam.*

Solusi Alternatif

- *Sosialisasi aktif melalui RT/RW dan lembaga kemasyarakatan*

49. Meningkatkan Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat*
- *Sinergi dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), LPM, dan RT/RW dalam mendukung kelancaran pelayanan pemberdayaan*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, terutama jika keadaan sering hujan halaman Kelurahan tergenang air*
- *Tidak semua warga memahami alur pelayanan atau persyaratan administrasi.*

Solusi Alternatif

Pengadaan perangkat pendukung pelayanan dan peningkatan kualitas ruang pelayanan

50. Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan (Kelurahan Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan (Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Komitmen pimpinan dan perangkat kelurahan*
- *Penggunaan sistem informasi perencanaan dan keuangan daerah untuk meningkatkan akurasi dan transparansi*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Keterbatasan kapasitas SDM dalam perencanaan dan evaluasi*
- *Evaluasi lebih berfokus pada realisasi fisik dan keuangan dibanding outcome*
- *Ketidakselarasan dokumen Kelurahan terhadap dokumen Kecamatan*

Solusi Alternatif

- *Penguatan koordinasi dengan kecamatan dan perangkat daerah terkait*
- *Memastikan seluruh tahapan perencanaan dan pelaporan terdokumentasi secara digital*
- *Melakukan review triwulanan terhadap capaian program dan realisasi anggaran*

51. Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas (Kelurahan Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas (Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Laporan realisasi anggaran dan administrasi keuangan disampaikan sesuai jadwal*
- *Pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan untuk pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan secara tertib*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Belum tertibnya pengelolaan keuangan di Kelurahan*
- *Dokumen dari pelaksana kegiatan tidak selalu disampaikan tepat waktu*

Solusi Alternatif

- *Melakukan pengecekan berkala atas kelengkapan dokumen dan kesesuaian pencatatan*
- *Koordinasi intensif dengan kecamatan dan BPKPAD*

52. Terselenggaranya kegiatan kantor (Kelurahan Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor (Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Persentase Terasfasilasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Terjalannya komunikasi yang baik antara Lurah, Sekretaris, dan seluruh staf di Kelurahan Gambut Barat*
- *Tersedianya ruang kerja, peralatan administrasi, dan fasilitas pendukung pelayanan*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Pegawai harus menangani beberapa pekerjaan sekaligus sehingga berpotensi menurunkan efektivitas*
- *Beban administrasi yang tinggi*

Solusi Alternatif

- *Mengoptimalkan peran masing-masing pegawai sesuai tupoksi*
- *Melaksanakan rapat internal secara berkala untuk memantau progres kegiatan*

53. Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan (Kelurahan Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan (Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Penyusunan RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) berdasarkan analisis kebutuhan riil*
- *Pencatatan barang dilakukan secara berkala dan terdokumentasi dengan baik*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi dalam satu tahun anggaran*
- *Barang mengalami penurunan fungsi akibat usia pakai*

Solusi Alternatif

- *Mengutamakan barang yang mendukung pelayanan publik dan operasional utama*
- *Pemutakhiran data inventaris secara berkala*

54. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Persentase

Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Identifikasi kebutuhan jasa (listrik, air, internet, kebersihan, keamanan, dan jasa lainnya) dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional kantor*
- *Dukungan anggaran dalam DPA memungkinkan pembayaran jasa penunjang secara tepat waktu*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Kenaikan tarif jasa dapat mempengaruhi kecukupan anggaran*
- *Pemakaian berlebihan dapat meningkatkan beban biaya*

Solusi Alternatif

- *Pembayaran tagihan tepat waktu*
- *Melakukan review realisasi belanja jasa penunjang setiap triwulan*

55. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan (Kelurahan Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Koordinasi antara pengelola BMD dan unit kerja terkait;*
- *SDM yang kompeten dalam pengelolaan BMD*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Kondisi sebagian BMD yang sudah tua atau rusak berat;*
- *Banyaknya jumlah dan jenis BMD yang harus dipelihara; dan*
- *Kerusakan pada peralatan dan mesin yang tidak bisa diprediksi*

Upaya Perbaikan

- *Menyusun jadwal pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana;*
- *Koordinasi dengan bidang aset terkait penghapusan barang*

56. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Lurah dan perangkat kelurahan mendorong dialog terbuka serta memberikan ruang penyampaian aspirasi*
- *Usulan masyarakat dibahas secara terbuka dan disampaikan kembali hasil prioritasnya.*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Tidak semua usulan dapat diakomodir sehingga dapat menurunkan antusiasme warga*
- *Usulan yang belum terealisasi dapat menimbulkan persepsi kurang efektifnya forum*

Solusi Alternatif

- *Memberikan pemahaman mengenai kewenangan, prioritas, dan mekanisme pengusulan*
- *Mengukur jumlah kehadiran dan kualitas usulan sebagai indikator peningkatan partisipasi*

57. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kasi Pemberdayaan Masyarakat / Kelurahan Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kasi Pemberdayaan Masyarakat / Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Pelaksanaan teknis didukung oleh instansi terkait sehingga sesuai spesifikasi*
- *Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Kondisi cuaca, lokasi, atau keterbatasan akses dapat menghambat pekerjaan*
- *Risiko kerusakan apabila tidak dirawat secara berkelanjutan*

Solusi Alternatif

- *Melakukan pengecekan progres fisik serta kualitas pekerjaan*

58. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Pemerintahan/Kelurahan Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Pemerintahan / Kelurahan Gambut Barat)

dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Sinergi dengan RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Kesibukan warga dalam bekerja membatasi waktu partisipasi*
- *Rendahnya keterampilan atau pemahaman dalam pengelolaan kegiatan.*

Solusi Alternatif

- *Memberikan pembinaan rutin kepada RT/RW, LPM, dan organisasi kemasyarakatan*

59. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Kesejahteraan Sosial/Kelurahan Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Kesejahteraan Sosial / Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Sinergi dengan RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Kesibukan warga dalam bekerja membatasi waktu partisipasi*
- *Rendahnya keterampilan atau pemahaman dalam pengelolaan kegiatan.*

Solusi Alternatif

- *Memberikan pembinaan rutin kepada RT/RW, LPM, dan organisasi kemasyarakatan*

60. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Pemberdayaan Masyarakat/Kelurahan Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Pemberdayaan Masyarakat / Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- *Sinergi dengan RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat*

Faktor Penghambat Sasaran

- *Kesibukan warga dalam bekerja membatasi waktu partisipasi*
- *Rendahnya keterampilan atau pemahaman dalam pengelolaan kegiatan.*

Solusi Alternatif

Memberikan pembinaan rutin kepada RT/RW, LPM, dan organisasi kemasyarakatan

- **program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Program yang mendukung Keberhasilan sasaran kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didukung oleh beberapa Program yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Aktivitas yang dilakukan adalah :

- a. Menjamin ketersediaan sarana pelayanan
- b. Melakukan rapat internal terkait Layanan Kecamatan agar masyarakat tidak dipersulit dalam memperoleh pelayanan dan transparan
- c. Melakukan pengawasan dan pembinaan melalui rapat internal terhadap petugas pelayanan
- d. Mendorong pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala
- e. Menyapa langsung masyarakat pengguna layanan dan menanyakan pengalaman mereka mendapatkan pelayanan di Kecamatan Martapura
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengaduan yang masuk ke Kecamatan

2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Program yang mendukung Keberhasilan sasaran kinerja Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi Kecamatan yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- c. Program Koordinasi upaya penyelenggaraan trantibum

- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Aktivitas yang dilakukan yaitu :

- a. Mengkoordinasikan pelayanan publik dan penguatan standar pelayanan
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa
- c. Menengahi permasalahan desa, termasuk batas wilayah dan konflik sosial
- d. Memimpin koordinasi lintas sektoral melalui Forkopimcam dan rapat koordinasi rutin dengan desa
- e. Melakukan pembinaan Linmas
- f. Melakukan penanganan cepat terhadap kerawanan sosial di masyarakat
- g. Membangun relasi sosial dan harmonisasi terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, Polsek, Danramil dan LPM

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Program yang mendukung Keberhasilan sasaran kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota. Adapun aktivitas yang dilakukan yaitu :

- a. Melakukan evaluasi terhadap Nilai SAKIP tahun sebelumnya
- b. Melaksanakan rapat internal AKIP Tahun 2026 lingkup Kecamatan Gambut
- c. Melakukan sosialisasi AKIP kepada seluruh pegawai Kecamatan Gambut agar memahami pentingnya akuntabilitas
- d. Memastikan kelengkapan data dukung komponen yang masuk dalam penilaian AKIP Tahun 2026

4. Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung Keberhasilan sasaran kinerja Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota. Adapun aktivitas yang dilakukan yaitu :

- a. Melaksanakan rapat internal Penilaian Mandiri Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)
- b. Melakukan sosialisasi Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah kepada seluruh pegawai Kecamatan Gambut
- c. Memastikan kelengkapan data dukung komponen kinerja utama, kepatuhan dan kinerja pelayanan publik

- d. Memberikan arahan kepada Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk kelengkapan data dukung IKKI yang masih belum lengkap
- e. Melakukan evaluasi secara berkala

5. Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas

Kegiatan yang mendukung Keberhasilan sasaran kinerja Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan didukung oleh sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah didukung oleh aktivitas sebagai berikut :
 1. Camat Gambut membentuk tim yang terdiri dari Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Staf Perencanaan ;
 2. Pengumpulan Data dan Informasi oleh Tim Kecamatan Gambut yang memiliki sumber dari data statistik, hasil evaluasi kinerja sebelumnya, kebijakan pemerintah daerah, dan dokumen perencanaan lainnya ;
 3. Analisis situasi data dan informasi yang sudah dikumpulkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada sebagai dasar perumusan dokumen perencanaan ;
 4. Konsultasi dengan perangkat daerah dan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan, saran dan aspirasi dalam penyusunan dokumen perencanaan;
 5. Revisi dokumen terhadap draf dokumen berdasarkan masukan dan saran yang diperoleh dari konsultasi dengan perangkat daerah dan stakeholder terkait;
 6. Finalisasi Dokumen Perencanaan yang telah disetujui oleh Camat Gambut;
 7. Dokumentasi dan pelaporan dokumen perencanaan yang telah final.
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD didukung oleh aktivitas sebagai berikut :
 1. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait hasil capaian kinerja.
 2. Analisis data dan informasi yang sudah dikumpulkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada sebagai dasar perumusan dokumen perencanaan;

3. Penyusunan laporan capaian kinerja Kecamatan Gambut, mulai dari persiapan hingga finalisasi;
 4. Finalisasi laporan capaian kinerja yang disetujui oleh Camat Gambut
 5. Melakukan dokumentasi dan pelaporan laporan capaian kinerja yang telah final.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh aktivitas sebagai berikut:
 1. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait hasil evaluasi realisasi fisik dan keuangan;
 2. Melakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Camat tentang penyampaian pendorong dan penghambat dalam pencapaian realisasi fisik dan keuangan;
 3. Menyusun draft laporan evaluasi kinerja;
 4. Melakukan penginputan realisasi fisik dan keuangan beserta data-data pendukung lainnya ke dalam aplikasi SIMONDALEV;
 5. Dokumentasi dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

6. Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah didukung dengan sub kegiatan

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, yang didukung oleh beberapa aktivitas yaitu :
 - a. Menyusun kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan ASN berdasarkan jumlah pegawai, golongan, jabatan, masa kerja dan peraturan yang berlaku;
 - b. Memverifikasi data ASN yang telah disusun;
 - c. Melakukan Perhitungan gaji dan tunjangan berdasarkan golongan, jabatan, dan masa kerja ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN;
 - e. Penyusunan laporan yang berisi realisasi anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN;
 - f. Pertanggungjawaban tentang laporan keuangan, bukti-bukti pembayaran dan dokumen-dokumen yang relevan.
- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, yang didukung oleh beberapa aktivitas yaitu :

- a. Melaksanakan perencanaan dan penganggaran dalam menyusun rencana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Verifikasi dan validasi data penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan;
- c. Perhitungan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Pembayaran penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan;
- e. Penyusunan laporan yang berisi realisasi anggaran untuk penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan;
- f. Pertanggungjawaban tentang laporan keuangan, bukti-bukti pembayaran dan dokumen-dokumen yang relevan
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, didukung oleh beberapa aktivitas yaitu :
 - a. Sub Bagian Keuangan mengidentifikasi data dan informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan. Data ini meliputi data keuangan (misalnya, realisasi anggaran dan belanja) dan data non-keuangan (misalnya, data kinerja, data pegawai);
 - b. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait yaitu BPKPAD Bidang Akuntansi dan Pelaporan untuk memastikan data untuk penyusunan Laporan Keuangan telah memadai dan sesuai dengan standar Akuntansi yang berlaku;
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data laporan keuangan;
 - d. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan data yang telah diolah;
 - e. Review dan koreksi oleh BPKPAD Bidang Akuntansi dan Pelaporan terhadap laporan keuangan yang telah disusun;
 - f. Penyampaian draf laporan keuangan kepada BPKPAD Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - g. Penyampaian laporan keuangan yang telah final kepada BPKPAD Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

7. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran adalah Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan a) Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD.

Aktifitas dari kegiatan dan sub kegiatan tersebut sehingga tercapainya sasaran kinerja adalah

- a. Sub Bagian Aset mengidentifikasi data dan informasi yang dibutuhkan untuk rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
- b. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait yaitu BPKPAD Bidang Aset untuk memastikan data untuk rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data barang milik daerah;
- d. Penyusunan laporan barang milik daerah;
- e. Review dan koreksi laporan barang milik daerah oleh BPKPAD Bidang Aset;
- f. Penyampaian laporan barang milik daerah per Triwulan kepada BPKPAD Bidang Aset;
- g. Evaluasi terhadap seluruh proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah.

8. Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu :

- Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai, didukung oleh beberapa aktifitas yaitu :
 - a. Camat Gambut membentuk tim yang terdiri dari Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Staf Kepegawaian;
 - b. Tim mengidentifikasi indikator kinerja yang relevan dengan tugas dan tanggungjawab pegawai;
 - c. Penyusunan rencana pelaksanaan mencakup jadwal kegiatan, metode pengumpulan data dan melibatkan SKPD yang terlibat seperti BKPSDM Kabupaten Banjar;
 - d. Pengumpulan dan pengolahan data kinerja pegawai;
 - e. Monitoring dan evaluasi kinerja pegawai;
 - f. Pemberian *reward and punishment* terhadap pegawai yang memiliki kinerja terbaik dan memberikan sanksi jika terdapat pegawai yang melanggar aturan;
 - g. Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja

9. Terselenggaranya kegiatan kantor

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran adalah Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan, yaitu :

- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, didukung oleh beberapa aktivitas yaitu:
 - a. Identifikasi kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan;
 - b. Penyusunan rencana mencakup jenis komponen yang dibutuhkan, jumlah, spesifikasi teknis, anggaran, jadwal yang dibutuhkan serta kriteria pemilihan;
 - c. Pemesanan dan pembelian komponen instalasi listrik dan penerangan melalui penyedia terpilih;
 - d. Pelaksanaan pemasangan dan pengujian komponen instalasi listrik dan penerangan;
 - e. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, data komponen, dokumentasi pembelian dan bukti pembayaran/belanja komponen instalasi listrik dan penerangan.
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, didukung oleh beberapa aktivitas yaitu :
 - a. Identifikasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - b. Penyusunan rencana mencakup jenis peralatan dan perlengkapan, jumlah dan spesifikasi teknis;
 - c. Pemesanan dan pembelian peralatan dan perlengkapan kantor melalui penyedia terpilih;
 - d. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - e. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, data peralatan dan perlengkapan kantor, dokumentasi pembelian dan bukti pembayaran/belanja peralatan dan perlengkapan kantor.
- Penyediaan peralatan rumah tangga, didukung oleh beberapa aktivitas yaitu:
 - a. Identifikasi kebutuhan peralatan rumah tangga;
 - b. Penyusunan rencana mencakup jenis peralatan rumah tangga, jumlah dan spesifikasi teknis;
 - c. Pemesanan dan pembelian peralatan rumah tangga melalui penyedia terpilih;
 - d. Pelaksanaan penataan dan penggunaan peralatan rumah tangga;
 - e. Pemeliharaan peralatan rumah tangga;

- f. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, data rumah tangga, dokumentasi pembelian dan bukti pembayaran/belanja peralatan rumah tangga.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, didukung oleh beberapa aktivitas yaitu:
 - a. Identifikasi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan;
 - b. Penyusunan daftar kebutuhan mencakup jenis barang cetakan dan penggandaan, jumlah dan spesifikasi teknis;
 - c. Pemesanan dan pembelian barang cetakan dan penggandaan melalui penyedia terpilih;
 - d. Evaluasi penggunaan anggaran dan pemeliharaan barang cetakan dan penggandaan;
 - e. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar barang cetakan dan penggandaan, dokumentasi pembelian dan bukti pembayaran/belanja barang cetakan dan penggandaan.
- Fasilitasi kunjungan tamu, didukung oleh beberapa aktivitas yaitu:
 - a. Penerimaan informasi mengenai rencana kunjungan tamu;
 - b. Koordinasi internal untuk memastikan ketersediaan informasi, ruangan, peralatan dan sumber daya lain yang dibutuhkan;
 - c. Persiapan materi dan pengaturan logistik dalam fasilitasi kunjungan tamu;
 - d. Penyambutan, registrasi dan kunjungan oleh tamu yang difasilitasi;
 - e. Penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh tamu;
 - f. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar tamu yang hadir, hasil diskusi, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan umpan balik dari tamu.
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, didukung oleh beberapa aktivitas yaitu:
 - a. Identifikasi tujuan rapat koordinasi dan konsultasi;
 - b. Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi antar SKPD;
 - c. Penyusunan laporan mencakup hasil rapat koordinasi dan konsultasi, keputusan yang diambil dan tugas-tugas yang perlu ditindaklanjuti.

- Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD, didukung oleh beberapa aktivitas yaitu:
 - a. Camat Gambut membentuk Tim Arsip Kecamatan Gambut;
 - b. Membuat klasifikasi arsip sesuai jenis, seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan kegiatan;
 - c. Menerima arsip dari unit di SKPD;
 - d. Melakukan pencatatan arsip masuk ke dalam register atau aplikasi informasi kearsipan;
 - e. Memberikan kode klasifikasi dan nomor arsip.

10. Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja adalah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah dengan sub kegiatan

- Pengadaan Mebel, didukung oleh aktivitas yaitu :
 - a. Identifikasi kebutuhan pengadaan mebel;
 - b. Penyusunan daftar kebutuhan seperti jenis mebel, jumlah dan spesifikasi teknis setiap jenis mebel;
 - c. Pemesanan dan pembelian mebel melalui penyedia terpilih;
 - d. Penataan dan penggunaan mebel;
 - e. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar mebel yang dibeli, informasi penyedia, dokumentasi pembelian dan bukti pembayaran/belanja pengadaan mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya, didukung oleh aktivitas yaitu :
 - a. Identifikasi kebutuhan pengadaan peralatan dan mesin;
 - b. Penyusunan daftar kebutuhan seperti jenis peralatan dan mesin, jumlah dan spesifikasi teknis setiap jenis peralatan dan mesin;
 - c. Pemesanan dan pembelian peralatan dan mesin melalui penyedia terpilih;
 - d. Penataan dan penggunaan peralatan dan mesin;
 - e. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar peralatan dan mesin yang dibeli, informasi penyedia, dokumentasi pembelian dan bukti pembayaran/belanja pengadaan peralatan dan mesin.

11. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran adalah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan aktifitas sebagai berikut :

- a. Identifikasi kebutuhan jasa surat menyurat (belanja meterai)
- b. Penyusunan daftar kebutuhan seperti jenis jasa surat menyurat (belanja meterai)
- c. Pemesanan dan pembelian jasa surat menyurat (belanja meterai) melalui penyedia terpilih
- d. Penataan dan penggunaan jasa surat menyurat (belanja meterai)
- e. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, informasi penyedia jasa pos, jumlah meterai yang dibeli, anggaran yang digunakan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan aktifitas sebagai berikut :
 - a. Identifikasi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
 - b. Berlangganan layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan penyedia yang telah dipilih
 - c. Penggunaan layanan komunikasi, sumber daya air dan Listrik
 - d. Pemeliharaan rutin terhadap instalasi dan peralatan yang terkait dengan penyediaan jasa
 - e. Membayar tagihan layanan secara tepat waktu
 - f. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar penyedia jasa yang digunakan, biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing jenis jasa dan evaluasi terhadap efisiensi penggunaan
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan aktifitas sebagai berikut :
 - a. Identifikasi dan verifikasi data pegawai non-ASN yang berhak menerima honorarium dan BPJS
 - b. Menghitung besaran honorarium dan iuran BPJS masing-masing pegawai yang dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku
 - c. Penerbitan Surat Keputusan (SK) sebagai dasar hukum untuk pembayaran honorarium dan iuran BPJS
 - d. Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) honorarium dan iuran BPJS
 - e. Proses pembayaran honorarium dan iuran BPJS
 - f. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar pegawai non-ASN yang menerima honorarium dan BPJS dan besaran honorarium dan iuran BPJS yang dibayarkan

12. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan

- Pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dengan aktifitas sebagai berikut:
 - a. Mendata kendaraan dinas operasional atau lapangan yang menjadi asset SKPD
 - b. Analisis kebutuhan terkait pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan
 - c. Melakukan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan secara berkala baik pemeliharaan rutin maupun perbaikan jika ada kerusakan
 - d. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar kendaraan yang dipelihara, rincian biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dengan aktifitas sebagai berikut:
 - a. Melakukan pendataan terhadap seluruh peralatan dan mesin yang dimiliki SKPD
 - b. Analisis kebutuhan terkait pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - c. Melakukan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya secara berkala baik pemeliharaan rutin maupun perbaikan jika ada kerusakan
 - d. Pembayaran pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - e. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan
 - f. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar peralatan dan mesin yang dipelihara, jenis pemeliharaan yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, dengan aktifitas sebagai berikut:
 - a. Identifikasi terhadap kerusakan atau kebutuhan pemeliharaan pada gedung kantor dan bangunan lainnya
 - b. Melakukan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya secara berkala baik pemeliharaan rutin maupun perbaikan jika ada kerusakan
 - c. Pembayaran pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya

- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan
- e. Penyusunan laporan mencakup pelaksanaan pekerjaan, realisasi fisik, realisasi anggaran, jadwal, dokumentasi yang relevan dan kendala yang dihadapi

13. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik

Program yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dengan kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.

Adapun aktivitas yang dilakukan yaitu :

- a. Melakukan peninjauan dan pembaruan Standar Pelayanan (SP) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) seluruh jenis pelayanan di kecamatan
- b. Memastikan kelengkapan fasilitas ruang pelayanan seperti kursi tunggu, papan informasi, area khusus disabilitas, dan fasilitas kebersihan
- c. Melakukan penyederhanaan alur pelayanan untuk mengurangi birokrasi berlapis
- d. Membangun jejaring dengan instansi vertikal untuk layanan yang memerlukan verifikasi lintas sektor

14. Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan adalah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Aktifitas dari kegiatan dan sub kegiatan tersebut sehingga tercapainya sasaran kinerja adalah Monev Desa.

15. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

dengan sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Aktivitas dari kegiatan dan sub kegiatan tersebut sehingga tercapainya sasaran kinerja adalah Monev Pelayanan.

16. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat adalah Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dengan sub kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Aktivitas dari kegiatan dan sub kegiatan tersebut sehingga tercapainya sasaran kinerja adalah :

- a. Pelaksanaan Musrenbang Tematik Stunting
- b. Pelaksanaan PHBI (Isra Mi'raj dan Safari Ramadhan)
- c. Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat (KKS)
- d. Pelaksanaan Aksi Bangda

17. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Program yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja Meningkatnya pemberdayaan masyarakat adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu :
 - a. Berkoordinasi dengan Dinas PMD, Dinas Koperasi/UMKM, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dan OPD terkait lainnya
 - b. Mengorganisir kegiatan musyawarah desa dan forum konsultasi publik untuk memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi
 - c. Menggerakkan tokoh masyarakat untuk terlibat dalam program pemberdayaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan
 - d. Mendorong pengembangan BUMDes dengan memberikan pendampingan administratif, pelaporan, dan manajemen usaha
 - e. Melakukan monitoring rutin ke desa untuk memastikan program pemberdayaan berjalan efektif
 - f. Berkoordinasi dengan Dinas PMD, Dinas Koperasi/UMKM, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dan OPD terkait lainnya

- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja PKK tingkat kecamatan
 - b. Melakukan monitoring rutin ke Kelurahan/Desa terkait pelaksanaan 10 program pokok PKK
 - c. Berkolaborasi dengan Puskesmas dalam program gizi, kesehatan ibu-anak, posyandu, dan stunting

18. Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa adalah Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan sub kegiatan

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa, aktivitas yang mendukung yaitu :
 - a. Melaksanakan sosialisasi tahapan Musrenbang Desa
 - b. Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok Masyarakat gar memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam Musrenbang
 - c. Menyajikan data pembangunan desa (data kemiskinan, infrastruktur, layanan dasar) agar masyarakat memahami prioritas dan ikut terlibat dalam pengambilan Keputusan
 - d. Mengadakan diskusi awal di tingkat dusun/RT untuk merumuskan usulan yang akan dibawa ke Musrenbang Desa
 - e. Mengundang perwakilan perempuan, pemuda, difabel, tokoh masyarakat, dan kelompok miskin agar kehadiran peserta lebih inklusif
 - f. Mengelompokkan usulan berdasarkan bidang (pembangunan, pemberdayaan, pemerintahan) dan memverifikasi kesesuaian dengan RPJMDes/RKPDes
 - g. Membuat dokumentasi kegiatan, daftar hadir, foto kegiatan, serta rekapitulasi usulan masyarakat sebagai bahan ke kecamatan
 - h. Mengidentifikasi kendala dan tingkat partisipasi masyarakat serta memberikan rekomendasi peningkatan untuk tahun berikutnya
- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, aktivitas yang mendukung yaitu :
 - a. Melakukan penyusunan jadwal kegiatan Sosialisasi BUMDES, Pokjanal Posyandu dan Monitoring dan Evaluasi APBDes

- b. Melakukan koordinasi terkait persiapan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi BUMDES, Pokjanal Posyandu dan Monitoring dan Evaluasi APBDes
- c. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang berisi foto kegiatan , daftar hadir, notulen dan hasil kegiatan.

19. Terselenggaranya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja Terselenggaranya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Aktifitas dari sub kegiatan tersebut sehingga tercapainya sasaran kinerja adalah Rapat Koordinasi dan Pembinaan TP. PKK

20. Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

Program yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan kegiatan

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu :
 - a. Melakukan koordinasi dengan Polsek, Koramil, dan Satpol PP dalam penanganan cepat gangguan ketertiban
 - b. Fasilitasi mediasi konflik sosial dan perselisihan warga bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa
 - c. Mengawasi ketertiban kegiatan masyarakat seperti acara besar, pasar malam, kegiatan kepemudaan, dan keramaian untuk memastikan izin dan standar keamanan dipenuhi
 - d. Menggerakkan LINMAS/Poskamling desa untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan respons cepat terhadap potensi gangguan
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu :
 - a. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga ketertiban umum, seperti larangan miras, kebisingan malam hari, dan pengelolaan lingkungan aman melalui sosialisasi perda/perkada

21. Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan sub kegiatan

- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
Aktifitas dari kegiatan dan sub kegiatan tersebut sehingga tercapainya sasaran kinerja adalah :
 - a. Menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Siaga Bencana.
 - b. Melakukan rapat koordinasi sebelum pelaksanaan kegiatan
 - c. Memfasilitasi kegiatan FKUB, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Siaga Bencana.
 - d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan

22. Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti

Kegiatan yang mendukung sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yaitu Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

23. Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Ketentraman dan Ketertiban

Kegiatan yang mendukung sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Ketentraman dan Ketertiban dengan indikator Persentase Pelayanan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang sesuai dengan Standar Pelayanan yaitu Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

24. Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi/Sinergi

dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Aktifitas dari kegiatan dan sub kegiatan tersebut sehingga tercapainya sasaran kinerja adalah Pelaksanaan Sosialisasi Perda/Perkada yang akan dilaksanakan pada triwulan II.

25. Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Program yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum adalah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Adapun aktivitas yang mendukung kegiatan ini adalah :

- a. Pelaksanaan HUT RI ke-81
- b. Pelaksanaan MTQ Kabupaten
- c. Pelaksanaan Forkopimcam

26. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan sub kegiatan yaitu :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan aktifitas pelaksanaan HUT RI ke-81
- b. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dengan aktifitas pelaksanaan MTQ Kabupaten
- c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan aktifitas rakor Forkopimcam.

27. Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti

Kegiatan yang mendukung sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti dengan indikator Persentase

Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti yaitu Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

28. Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang mendukung sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan.

29. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa

Program yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa adalah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja ini yaitu Pelaksanaan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

30. Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran adalah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan sub kegiatan :

- Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu :
 - a. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
 - b. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - d. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - e. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa

- f. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

31. Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut)

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran adalah Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut) dengan sub kegiatan :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Kecamatan terkait jadwal Musrenbang dan pedoman serta arah kebijakan pembangunan
 - b. Mengidentifikasi usulan yang sudah terealisasi, belum terealisasi, dan tertunda
 - c. Melaksanakan kegiatan Musrenbang Kelurahan
 - d. Mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:
 - a. Menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana (jalan lingkungan, drainase, posyandu, penerangan jalan, balai warga, dll)
 - b. Menentukan prioritas berdasarkan urgensi dan manfaat masyarakat
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:
 - a. Menginventarisasi potensi masyarakat (UMKM, kelompok wanita, karang taruna, kader posyandu, dll)
 - b. Menghimpun usulan melalui RT/RW, LPM, PKK, dan forum Musrenbang
 - c. Menyusun skala prioritas berdasarkan kebutuhan mendesak dan manfaat luas
- Evaluasi Kelurahan, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:
 - a. Mengevaluasi Kinerja pelayanan publik, pelaksanaan kegiatan dan anggaran, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan administrasi pemerintahan
 - b. Menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi
 - c. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Camat

32.Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti (Kelurahan Gambut)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Menyusun SOP penanganan pengaduan masyarakat
- b. Menetapkan admin/petugas pencatat pengaduan
- c. Menginformasikan mekanisme pengaduan kepada RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna
- d. Mendisposisikan kepada staf/Tim terkait
- e. Memastikan pengaduan ditindaklanjuti sesuai batas waktu

33.Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Mengidentifikasi jenis layanan pemberdayaan (rekomendasi bantuan UMKM, fasilitasi pelatihan, pendataan kelompok masyarakat, surat keterangan usaha, dll)
- b. Menginventarisasi kendala akses masyarakat (jarak, waktu pelayanan, kurangnya informasi, prosedur yang rumit)
- c. Menyediakan papan informasi, banner alur pelayanan, dan daftar persyaratan
- d. Monitoring dan evaluasi Pelayanan

34.Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Menyusun dan Revisi SOP
- b. Menetapkan dan Mensosialisasikan SOP Baru
- c. Monitoring dan evaluasi Pelayanan

35.Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan (Kelurahan Gambut)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan Perencanaan Kecamatan terkait dokumen perencanaan Kecamatan, dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja untuk Kelurahan
- b. Menghimpun usulan dari masing-masing seksi di Kelurahan
- c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing seksi

- d. Menyampaikan laporan perencanaan, realisasi anggaran dan kinerja yang telah diketahui Lurah kepada Camat

36. Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas (Kelurahan Gambut)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Mengusulkan dan memastikan penetapan PPTK dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Kelurahan
- b. Memeriksa kelengkapan SPP, SPM, dan dokumen pendukung
- c. Melakukan rekonsiliasi internal antara realisasi fisik dan keuangan
- d. Menyusun laporan realisasi anggaran bulanan/triwulan
- e. Mengarsipkan dokumen SPP, SPM, SPJ, dan bukti setor pajak

37. Terselenggaranya kegiatan kantor (Kelurahan Gambut)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Identifikasi kebutuhan kantor;
- b. Penyusunan rencana mencakup jenis komponen yang dibutuhkan, jumlah, spesifikasi teknis, anggaran, jadwal yang dibutuhkan serta kriteria pemilihan;
- c. Pemesanan dan pembelian kebutuhan kantor melalui penyedia terpilih;
- d. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, data komponen, dokumentasi pembelian dan bukti pembayaran/belanja

38. Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan (Kelurahan Gambut)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Identifikasi kebutuhan pengadaan mebel/peralatan/mesin;
- b. Penyusunan daftar kebutuhan seperti jenis mebel/peralatan/mesin, jumlah dan spesifikasi teknis setiap jenis mebel/peralatan/mesin;
- c. Pemesanan dan pembelian mebel/peralatan/mesin melalui penyedia terpilih;
- d. Penataan dan penggunaan mebel/peralatan/mesin
- e. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar mebel yang dibeli, informasi penyedia, dokumentasi pembelian dan bukti pembayaran/belanja pengadaan mebel/peralatan/mesin

39. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Gambut)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu :

- a. Identifikasi kebutuhan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan Listrik.
- b. Identifikasi dan verifikasi data pegawai non-ASN yang berhak menerima honorarium dan BPJS
- c. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, informasi penyedia jasa pos, jumlah meterai yang dibeli, anggaran yang digunakan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
- d. Berlangganan layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan penyedia yang telah dipilih
- e. Penggunaan layanan komunikasi, sumber daya air dan Listrik
- f. Membayar tagihan layanan secara tepat waktu
- g. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar penyedia jasa yang digunakan, biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing jenis jasa dan evaluasi terhadap efisiensi penggunaan
- h. Menghitung besaran honorarium dan iuran BPJS masing-masing pegawai yang dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku
- i. Penerbitan Surat Keputusan (SK) sebagai dasar hukum untuk pembayaran honorarium dan iuran BPJS
- j. Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) honorarium dan iuran BPJS
- k. Proses pembayaran honorarium dan iuran BPJS
- l. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar pegawai non-ASN yang menerima honorarium dan BPJS dan besaran honorarium dan iuran BPJS yang dibayarkan

40. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan (Kelurahan Gambut)

- Pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dengan aktifitas sebagai berikut:
 - a. Mendata kendaraan dinas operasional atau lapangan yang menjadi asset SKPD
 - b. Analisis kebutuhan terkait pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan
 - c. Melakukan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan secara berkala baik pemeliharaan rutin maupun perbaikan jika ada kerusakan

- d. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar kendaraan yang dipelihara, rincian biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dengan aktifitas sebagai berikut:
 - a. Melakukan pendataan terhadap seluruh peralatan dan mesin yang dimiliki SKPD
 - b. Analisis kebutuhan terkait pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - c. Melakukan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya secara berkala baik pemeliharaan rutin maupun perbaikan jika ada kerusakan
 - d. Pembayaran pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - e. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan
 - f. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar peralatan dan mesin yang dipelihara, jenis pemeliharaan yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, dengan aktifitas sebagai berikut:
 - a. Identifikasi terhadap kerusakan atau kebutuhan pemeliharaan pada gedung kantor dan bangunan lainnya
 - b. Melakukan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya secara berkala baik pemeliharaan rutin maupun perbaikan jika ada kerusakan
 - c. Pembayaran pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya
 - d. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan
 - e. Penyusunan laporan mencakup pelaksanaan pekerjaan, realisasi fisik, realisasi anggaran, jadwal, dokumentasi yang relevan dan kendala yang dihadapi

41. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Gambut)

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran adalah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan sub kegiatan :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan Musrenbang Kelurahan

- b. Pengumpulan data/usulan Musrenbang dari warga / lembaga kemasyarakatan
- c. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan
- d. Dokumentasi/pelaporan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan

42. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gambut)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan warga melalui forum diskusi untuk menentukan prioritas sarana (jalan/drainase/taman/dll)
- b. Koordinasi dengan RT/RW, tokoh masyarakat serta instansi teknis
- c. Membentuk tim monitoring dari unsur kelurahan dan masyarakat untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar
- d. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan

43. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Pemerintahan/Kelurahan Gambut)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan (Penyediaan upah jasa/insentif kader LPM, Linmas, RT/RW, Puskesmas)
- b. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor
- c. Menyusun jadwal pemeliharaan peralatan dan mesin kantor
- d. Pelaksanaan kegiatan
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan

44. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Kesejahteraan Sosial/Kelurahan Gambut)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan (Penyediaan upah jasa/insentif kader LPM, Linmas, RT/RW, Puskesmas)
- b. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor
- c. Menyusun jadwal pemeliharaan peralatan dan mesin kantor
- d. Pelaksanaan kegiatan
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan

45. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Pemberdayaan Masyarakat/ Kelurahan Gambut)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan (Penyediaan upah jasa/insentif kader LPM, Linmas, RT/RW, Puskesmas)

- b. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor
- c. Menyusun jadwal pemeliharaan peralatan dan mesin kantor
- d. Pelaksanaan kegiatan
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan

46. Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat)

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran adalah Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat) dengan sub kegiatan :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Kecamatan terkait jadwal Musrenbang dan pedoman serta arah kebijakan pembangunan
 - b. Mengidentifikasi usulan yang sudah terealisasi, belum terealisasi, dan tertunda
 - c. Melaksanakan kegiatan Musrenbang Kelurahan
 - d. Mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:
 - a. Menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana (jalan lingkungan, drainase, posyandu, penerangan jalan, balai warga, dll)
 - b. Menentukan prioritas berdasarkan urgensi dan manfaat masyarakat
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:
 - a. Menginventarisasi potensi masyarakat (UMKM, kelompok wanita, karang taruna, kader posyandu, dll)
 - b. Menghimpun usulan melalui RT/RW, LPM, PKK, dan forum Musrenbang
 - c. Menyusun skala prioritas berdasarkan kebutuhan mendesak dan manfaat luas
- Evaluasi Kelurahan, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:
 - a. Mengevaluasi Kinerja pelayanan publik, pelaksanaan kegiatan dan anggaran, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan administrasi pemerintahan

- b. Menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi
- c. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Camat

47. Meningkatkan Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti (Kelurahan Gambut Barat)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Menyusun SOP penanganan pengaduan masyarakat
- b. Menetapkan admin/petugas pencatat pengaduan
- c. Menginformasikan mekanisme pengaduan kepada RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna
- d. Mendisposisikan kepada staf/Tim terkait
- e. Memastikan pengaduan ditindaklanjuti sesuai batas waktu

48. Meningkatkan Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Mengidentifikasi jenis layanan pemberdayaan (rekomendasi bantuan UMKM, fasilitasi pelatihan, pendataan kelompok masyarakat, surat keterangan usaha, dll)
- b. Menginventarisasi kendala akses masyarakat (jarak, waktu pelayanan, kurangnya informasi, prosedur yang rumit)
- c. Menyediakan papan informasi, banner alur pelayanan, dan daftar persyaratan
- d. Monitoring dan evaluasi Pelayanan

49. Meningkatkan Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Menyusun dan Revisi SOP
- b. Menetapkan dan Mensosialisasikan SOP Baru
- c. Monitoring dan evaluasi Pelayanan

50. Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan (Kelurahan Gambut Barat)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan Perencanaan Kecamatan terkait dokumen perencanaan Kecamatan, dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja untuk Kelurahan
- b. Menghimpun usulan dari masing-masing seksi di Kelurahan

- c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing seksi
- d. Menyampaikan laporan perencanaan, realisasi anggaran dan kinerja yang telah diketahui Lurah kepada Camat

51. Meningkatkan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas (Kelurahan Gambut Barat)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Mengusulkan dan memastikan penetapan PPTK dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Kelurahan
- b. Memeriksa kelengkapan SPP, SPM, dan dokumen pendukung
- c. Melakukan rekonsiliasi internal antara realisasi fisik dan keuangan
- d. Menyusun laporan realisasi anggaran bulanan/triwulan
- e. Mengarsipkan dokumen SPP, SPM, SPJ, dan bukti setor pajak

52. Terselenggaranya kegiatan kantor (Kelurahan Gambut Barat)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Identifikasi kebutuhan kantor;
- b. Penyusunan rencana mencakup jenis komponen yang dibutuhkan, jumlah, spesifikasi teknis, anggaran, jadwal yang dibutuhkan serta kriteria pemilihan;
- c. Pemesanan dan pembelian kebutuhan kantor melalui penyedia terpilih;
- d. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, data komponen, dokumentasi pembelian dan bukti pembayaran/belanja

53. Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan (Kelurahan Gambut Barat)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Identifikasi kebutuhan pengadaan mebel/peralatan/mesin;
- b. Penyusunan daftar kebutuhan seperti jenis mebel/peralatan/mesin, jumlah dan spesifikasi teknis setiap jenis mebel/peralatan/mesin;
- c. Pemesanan dan pembelian mebel/peralatan/mesin melalui penyedia terpilih;
- d. Penataan dan penggunaan mebel/peralatan/mesin
- e. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar mebel yang dibeli, informasi penyedia, dokumentasi pembelian dan bukti pembayaran/belanja pengadaan mebel/peralatan/mesin

54. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Gambut Barat)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu :

- a. Identifikasi kebutuhan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan Listrik.
- b. Identifikasi dan verifikasi data pegawai non-ASN yang berhak menerima honorarium dan BPJS
- c. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, informasi penyedia jasa pos, jumlah meterai yang dibeli, anggaran yang digunakan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
- d. Berlangganan layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan penyedia yang telah dipilih
- e. Penggunaan layanan komunikasi, sumber daya air dan Listrik
- f. Membayar tagihan layanan secara tepat waktu
- g. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar penyedia jasa yang digunakan, biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing jenis jasa dan evaluasi terhadap efisiensi penggunaan
- h. Menghitung besaran honorarium dan iuran BPJS masing-masing pegawai yang dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku
- i. Penerbitan Surat Keputusan (SK) sebagai dasar hukum untuk pembayaran honorarium dan iuran BPJS
- j. Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) honorarium dan iuran BPJS
- k. Proses pembayaran honorarium dan iuran BPJS
- l. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar pegawai non-ASN yang menerima honorarium dan BPJS dan besaran honorarium dan iuran BPJS yang dibayarkan

55. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan (Kelurahan Gambut Barat)

- Pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dengan aktifitas sebagai berikut:
 - a. Mendata kendaraan dinas operasional atau lapangan yang menjadi asset SKPD
 - b. Analisis kebutuhan terkait pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan

- c. Melakukan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan secara berkala baik pemeliharaan rutin maupun perbaikan jika ada kerusakan
- d. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar kendaraan yang dipelihara, rincian biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dengan aktifitas sebagai berikut:
 - a. Melakukan pendataan terhadap seluruh peralatan dan mesin yang dimiliki SKPD
 - b. Analisis kebutuhan terkait pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - c. Melakukan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya secara berkala baik pemeliharaan rutin maupun perbaikan jika ada kerusakan
 - d. Pembayaran pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - e. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan
 - f. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar peralatan dan mesin yang dipelihara, jenis pemeliharaan yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, dengan aktifitas sebagai berikut:
 - a. Identifikasi terhadap kerusakan atau kebutuhan pemeliharaan pada gedung kantor dan bangunan lainnya
 - b. Melakukan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya secara berkala baik pemeliharaan rutin maupun perbaikan jika ada kerusakan
 - c. Pembayaran pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya
 - d. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan
 - e. Penyusunan laporan mencakup pelaksanaan pekerjaan, realisasi fisik, realisasi anggaran, jadwal, dokumentasi yang relevan dan kendala yang dihadapi

56. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat)

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran adalah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan sub kegiatan :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan Musrenbang Kelurahan
 - b. Pengumpulan data/usulan Musrenbang dari warga / lembaga kemasyarakatan
 - c. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan
 - d. Dokumentasi/pelaporan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan

57. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan warga melalui forum diskusi untuk menentukan prioritas sarana (jalan/drainase/taman/dll)
- b. Koordinasi dengan RT/RW, tokoh masyarakat serta instansi teknis
- c. Membentuk tim monitoring dari unsur kelurahan dan masyarakat untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar
- d. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan

58. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Pemerintahan/Kelurahan Gambut Barat)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan (Penyediaan upah jasa/insentif kader LPM, Linmas, RT/RW, Puskesmas)
- b. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor
- c. Menyusun jadwal pemeliharaan peralatan dan mesin kantor
- d. Pelaksanaan kegiatan
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan

59. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Kesejahteraan Sosial/Kelurahan Gambut Barat)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan (Penyediaan upah jasa/insentif kader LPM, Linmas, RT/RW, Puskesmas)
- b. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor
- c. Menyusun jadwal pemeliharaan peralatan dan mesin kantor
- d. Pelaksanaan kegiatan
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan

60. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Pemberdayaan Masyarakat/ Kelurahan Gambut Barat)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan (Penyediaan upah jasa/insentif kader LPM, Linmas, RT/RW, Puskesmas)
- b. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor
- c. Menyusun jadwal pemeliharaan peralatan dan mesin kantor
- d. Pelaksanaan kegiatan
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan

• Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. Rekomendasi

Rekomendasi dari Pimpinan pada kinerja triwulan I, yaitu :

1. Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan
2. Jadwalkan Kembali kegiatan yang belum terealisasi

2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut terhadap rekomendasi Pimpinan pada triwulan I, yaitu :

1. Telah dilaksanakan rapat penyusunan jadwal pelaksanaan Monev APBDes.
2. Dokumen pelaksanaan kegiatan telah didokumentasikan dengan baik

Tabel 3 4 Realisasi Anggaran Kecamatan Gambut

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian (%)	Target s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	NA	NA	386,928,650	274,209,260	0.71
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	NA	NA	NA	386,928,650	274,209,260	0.71
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	NA	NA	3,481,084,656	1,104,552,330	0.32
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut	NA	NA	NA	3,481,084,656	1,104,552,330	0.32
5	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	30	15	50	6,690,000	3,890,400	0.58
6	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	26.32	26.32	100	3,192,676,000	896,856,025	0.28
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	25	25	100	500,000	178,800	0.36
8	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	40	40	100	1,680,000	1,650,000	0.98
9	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitasi Umum Perkantoran	25	20	80	69,168,000	33,445,239	0.48
10	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100	100	100	91,768,000	76,635,650	0.84
11	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	25	25	100	67,424,656	48,145,959	0.71
12	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	24.45	24.45	100	51,178,000	43,750,257	0.85

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian (%)	Target s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian (%)
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	15	15	100	33,846,000	29,093,000	0.86
14	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10	10	100	1,116,000	-	0.00
15	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	25	25	100	1,176,000	1,155,000	0.98
16	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	15	15	100	31,554,000	27,938,000	0.89
17	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	42	42	100	32,270,000	23,735,000	0.74
18	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60	60	100	21,470,000	16,680,000	0.78
19	Terselenggaranya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	24	24	100	10,800,000	7,055,000	0.65
20	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	NA	NA	NA	-	-	NA
21	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	NA	NA	NA	-	-	NA
22	Meningkatnya Pengaduan Usuran Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Usuran Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	25	25	100			NA

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian (%)	Target s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian (%)
23	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Pelayanan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang sesuai dengan Standar Pelayanan	25	25	100			NA
24	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	NA	NA	NA	-	-	NA
25	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	8	8	100	7,154,000	6,990,000	0.98
26	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8	8	100	7,154,000	6,990,000	0.98
27	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	25	25	100			NA
28	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan	25	25	100			NA
29	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	28.57	28.57	100	7,870,000	3,420,000	0.43
30	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.57	28.57	100	7,870,000	3,420,000	0.43
31	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10	10	100	143,886,250	132.673.531	0.92
32	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	25	25	100			

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian (%)	Target s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian (%)
33	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses	NA	NA	NA	51,356,250	43,551,531	0.85
34	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	25	25	100			
35	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	25	25	100			
36	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	25	25	100			
37	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	25	25	100			
38	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	25	25	100			
39	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	25	25	100	-	-	NA
40	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	25	25	100			
41	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	NA	NA	NA			
42	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	NA	NA	NA	-	-	NA
43	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	NA	NA	NA	92,530,000	89,122,000	0.96

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian (%)	Target s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian (%)
44	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	NA	NA	NA			
45	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	NA	NA	NA			
46	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	25	25	100	161,902,400	78,297,729	0.48
47	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	25	25	100			
48	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses	NA	NA	NA			
49	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	25	25	100	54,060,150	44,408,229	0.82
50	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	25	25	100			
51	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	25	25	100			
52	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	25	25	100			
53	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	25	25	100			

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian (%)	Target s.d Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian (%)
54	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	25	25	100			
55	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	25	25	100			
56	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	NA	NA	NA	-	-	NA
57	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	NA	NA	NA	63,083,000	-	0.00
58	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	NA	NA	NA	44,759,250	33,889,500	0.76
59	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	NA	NA	NA			
60	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	NA	NA	NA			

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Sebagian besar angka capaian Kinerja Kecamatan Gambut telah tercapai sebagaimana yang diperjanjikan di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Meskipun, masih ada beberapa sasaran kinerja yang belum mencapai 100%.
- b. Laporan Kinerja Triwulan I Kecamatan Gambut berpedoman pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Rencana Aksi Tahun 2026.
- c. Mengkoordinasikan setiap hambatan / kendala yang dihadapi kepada Pimpinan sebagai upaya dalam pencapaian target kinerja.

4.2 Langkah Perbaikan kedepan

Untuk perbaikan pada triwulan berikutnya, maka direkomendasikan hal sebagai berikut :

- a. Koordinasi dengan individu pada setiap seksi dan sub bagian untuk mendukung kualitas pelaporan terutama dalam menyampaikan data dukung, faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kecamatan Gambut yang telah diperjanjikan di PK Tahun 2026.
- b. Laporan kinerja triwulan I ini agar dapat dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada Tahun 2026, sehingga target kinerja dapat dicapai dan dihitung capaiannya pada akhir Tahun 2026.


Camat Gambut
Ramdani, S.AP., MA
NIP. 19710514 200604 1 017